

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021. Sedangkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 2 November 2022 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 2 November 2022.

Secara ringkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 setelah perubahan menetapkan target pendapatan sebesar Rp1.376.652.314.082,00 belanja sebesar Rp1.407.999.184.315,00 defisit sebesar Rp(31.346.870.233,00). Defisit anggaran Tahun 2022 direncanakan ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp31.346.870.233,00.

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 dapat digambarkan pada uraian berikut ini.

A. PENDAPATAN DAERAH.

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
1.348.628.181.500,28	1.363.454.281.992,95

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.348.628.181.500,28 dan Rp1.363.454.281.992,95 mengalami penurunan sebesar Rp14.826.100.492,67 atau sebesar 1,09%.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah.
2. Pendapatan Transfer.
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dalam tabel berikut :

Tabel 5. 1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	125.989.378.436,00	126.243.905.166,28	100,20	116.902.688.648,95
2	Pendapatan Transfer	1.206.070.909.646,00	1.191.493.250.334,00	98,79	1.179.715.146.176,00
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	44.592.026.000,00	30.891.026.000,00	69,27	66.836.447.168,00
Jumlah Pendapatan		1.376.652.314.082,00	1.348.628.181.500,28	97,96	1.363.454.281.992,95

Penjelasan terhadap pendapatan dan realisasi anggaran Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
126.243.905.166,28	116.902.688.648,95

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp125.989.378.436,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp126.243.905.166,28 atau 100,20%.

Jika dibandingkan realisasi PAD Tahun 2021 sebesar Rp116.902.688.648,95 maka realisasi Tahun 2022 lebih tinggi sebesar Rp9.341.216.517,33 atau 7,99%.

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
50.121.822.881,24	44.350.536.152,56

Untuk Tahun Anggaran 2022 penerimaan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp50.600.000.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp50.121.822.881,24 atau 99,05%.

Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2021 sebesar Rp44.350.536.152,56 pajak daerah untuk Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp5.771.286.728,68 atau 13,01%.

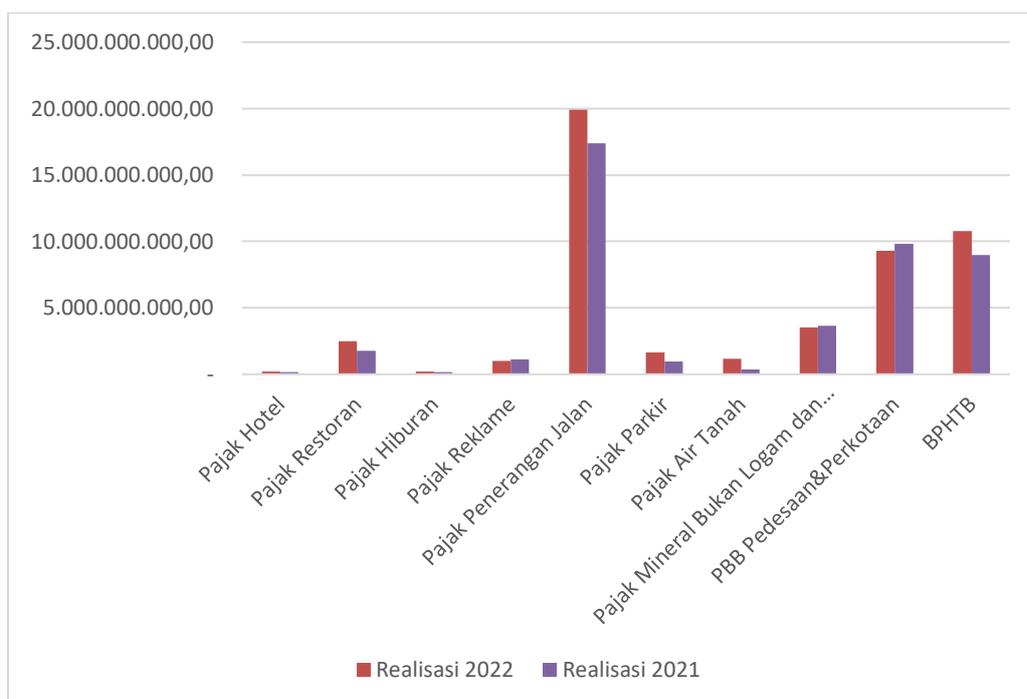
Rincian anggaran dan realisasi pajak daerah dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 2. Target Dan Realisasi Pajak Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pajak Hotel	200.000.000,00	200.571.992,00	100,29	142.644.605,00
2	Pajak Restoran	2.300.000.000,00	2.486.754.287,24	108,12	1.779.113.278,00
3	Pajak Hiburan	200.000.000,00	200.955.600,00	100,48	179.795.500,00
4	Pajak Reklame	1.300.000.000,00	1.014.234.565,00	78,02	1.122.892.677,00
5	Pajak Penerangan Jalan	20.000.000.000,00	19.915.265.373,00	99,58	17.386.213.695,00
6	Pajak Parkir	2.000.000.000,00	1.630.590.000,00	81,53	954.436.564,00
7	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	1.177.256.468,00	117,73	366.510.405,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian Gol. C)	3.500.000.000,00	3.531.787.190,00	100,91	3.643.616.500,56
9	PBB Pedesaan&Perkotaan	10.100.000.000,00	9.185.703.947,00	90,95	9.814.777.631,00
10	BPHTB	10.000.000.000,00	10.778.703.459,00	107,79	8.960.535.297,00
Jumlah		50.600.000.000,00	50.121.822.881,24	99,05	44.350.536.152,56

Berdasarkan rincian penerimaan Pajak Daerah diatas terlihat bahwa penerimaan Pajak yang tidak mencapai target yang ditetapkan seperti Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan PBB Pedesaan&Perkotaan. Apabila dilihat dari sisi nilai maka kontribusi realisasi penerimaan Pajak Daerah yang tertinggi adalah penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp19.915.265.373,00 atau 39,73% dari total realisasi Penerimaan Pajak Daerah.

Gambar 5. 1. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 - 2021



b. Retribusi Daerah.

Tahun 2022 **Tahun 2021**
(Rp) **(Rp)**
2.472.939.567,00 **2.171.696.648,00**

Target penerimaan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.213.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp2.472.939.567,00 atau 111,75%.

Dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2021 sebesar Rp2.171.696.648,00 retribusi daerah untuk Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp301.242.919,00 atau 13,87%. Adapun penyebabnya tidak tercapainya target pendapatan retribusi tahun ini karena masih rendahnya penerimaan beberapa retribusi daerah bahkan terdapat retribusi daerah yang capaiannya dibawah 50% yaitu Retribusi Izin Trayek.

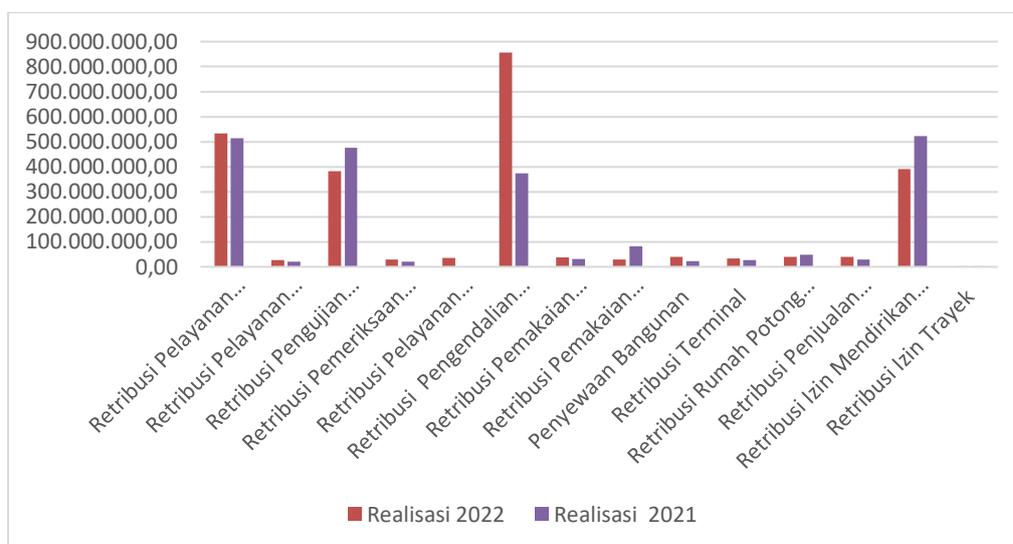
Rincian anggaran dan realisasi retribusi daerah dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 3. Target Dan Realisasi Retribusi Daerah

No.	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	500.000.000,00	532.550.000,00	106,51	514.850.000,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	30.000.000,00	26.283.000,00	87,61	21.032.000,00
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	450.000.000,00	382.085.000,00	84,91	474.988.300,00
4	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	20.000.000,00	28.434.500,00	142,17	21.605.000,00
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	40.000.000,00	36.279.700,00	90,70	0,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	650.000.000,00	856.570.000,00	131,78	373.185.000,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (laboratorium)	30.000.000,00	38.658.920,00	128,86	31.020.140,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (kendaraan bermotor)	50.000.000,00	28.956.000,00	57,91	82.597.200,00
9	Retribusi Penyewaan Bangunan	32.500.000,00	39.170.000,00	120,52	23.425.000,00
10	Retribusi Terminal	30.000.000,00	33.665.000,00	112,22	27.632.000,00
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	40.000.000,00	40.025.000,00	100,06	47.480.000,00
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	30.092.500,00
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	300.000.000,00	390.017.447,00	130,01	523.354.508,00
14	Retribusi Izin Trayek	500.000,00	245.000,00	49,00	435.000,00
Jumlah		2.213.000.000,00	2.472.939.567,00	111,75	2.171.696.648,00

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan capaian target Retribusi sebesar 13,87% dibandingkan dengan tahun 2021. Dari sisi realisasi penerimaan retribusi yang paling rendah yaitu Retribusi Izin Trayek 49,00%.

Gambar 5. 2. Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2022 - 2021



c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
7.214.956.413,00	5.884.534.467,00

Penerimaan dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga, untuk tahun 2022 direncanakan penerimaan atas pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp7.214.956.413,00 dan realisasinya sebesar Rp7.214.956.413,00 atau 100%.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari:

- 1) Setoran deviden Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) tahun buku 2021 yang diterima di Kas Umum Daerah pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp7.155.454.941,00;
- 2) Setoran Deviden BPR-PKPP tahun buku 2021 yang diterima di Kas Umum Daerah pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp48.307.000,00; dan
- 3) Setoran Deviden PT. Balairung Tahun Buku 2021 pada tanggal 8 Juli 2022 sebesar Rp11.194.472,00.

Tabel 5. 4. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.214.956.413,00	7.214.956.413,00	100,00	5.884.534.467,00
	Jumlah	7.214.956.413,00	7.214.956.413,00	100,00	5.884.534.467,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Tahun 2022 **Tahun 2021**
(Rp) **(Rp)**
66.434.186.305,04 **64.495.921.381,39**

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp65.961.422.023,00 dan terealisasi sebesar Rp66.434.186.305,04 atau 100,72%.

Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sebesar Rp64.495.921.381,39 terdapat kenaikan sebesar Rp1.938.264.923,65 atau 3,01%.

Gambaran realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

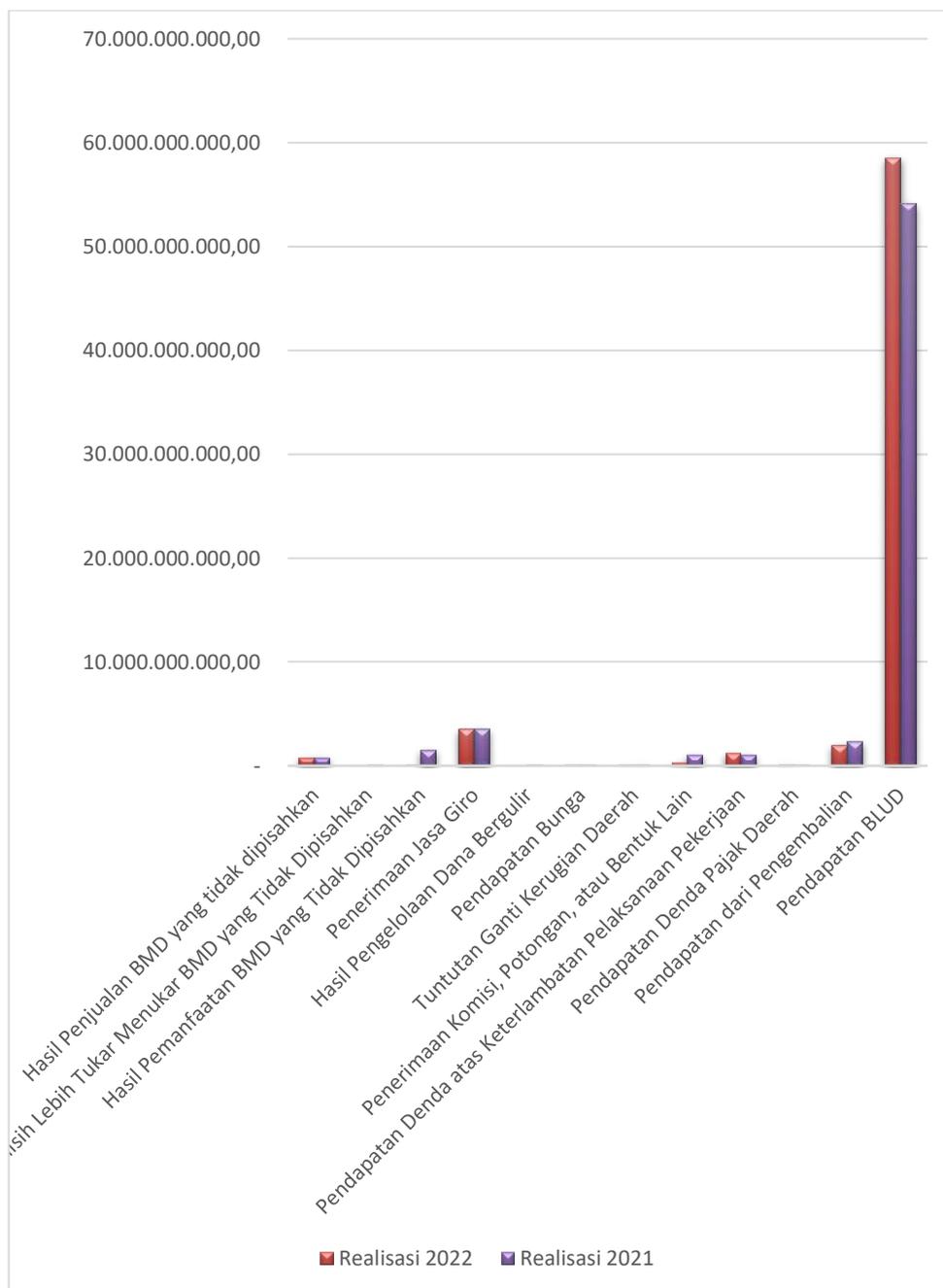
Tabel 5. 5. Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Target 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	212.500.000,00	736.931.794,00	346,79	729.749.770,00
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	52.045.100,00
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	1.500.000.000,00
4	Penerimaan Jasa Giro	3.000.000.000,00	3.533.544.958,00	117,78	3.555.986.723,00
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	23.220.138,00
6	Pendapatan Bunga	1.000.000,00	184.098,00	18,41	33.799.369,00
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	57.557.500,00	0,00	79.117.300,00
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	500.000.000,00	302.740.058,82	60,55	1.029.593.187,00
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	700.000.000,00	1.172.333.327,80	167,48	1.036.409.422,64
10	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	101.397.159,00	0,00	29.031.752,00
11	Pendapatan dari Pengembalian	1.200.000.000,00	1.979.908.262,42	164,99	2.302.357.618,75
12	Pendapatan BLUD	60.310.422.023,00	58.512.089.147,00	97,02	54.124.611.001,00
	Jumlah	65.961.422.023,00	66.434.186.305,04	100,72	64.495.921.381,39

Dari rincian penerimaan diatas dapat dijelaskan juga bahwa:

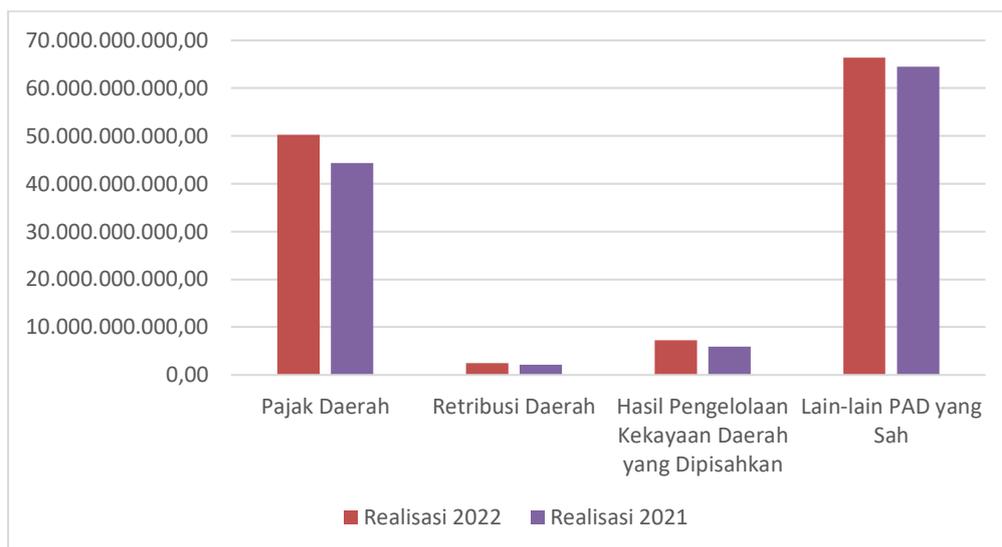
- 1) Penerimaan Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp736.931.794,00 merupakan Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp12.840.000,00 dan Hasil Penjualan Aset Lainnya sebesar Rp724.091.794,00;
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp37.500.000,00 merupakan hasil sewa ruangan ATM Bank Nagari di komplek RSUD;
- 3) Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp3.533.544.958,00 merupakan penerimaan jasa giro pada kas daerah sebesar Rp3.533.534.755,00 dan penerimaan Jasa Giro pada Kas di Bendahara Rp10.203,00;
- 4) Pendapatan Bunga sebesar Rp184.098,00 merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah;
- 5) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) terealisasi sebesar Rp57.557.500,00;
- 6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp302.740.058,82;
- 7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp1.172.333.327,80;
- 8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp101.397.159,00 merupakan Pendapatan Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
- 9) Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.979.908.262,42 merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp1.245.916.862,42 dan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp733.991.400,00; dan
- 10) Pendapatan BLUD sebesar Rp58.512.089.147,00.

Gambar 5. 3. Perbandingan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 - 2021



Berdasarkan Penjelasan atas Pendapatan Asli Daerah diatas dapat dilihat bahwa adanya kenaikan beberapa komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021.

Gambar 5. 4. Pendapatan Asli Daerah



Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Padang Pariaman belum optimal dengan dibuktikan masih banyak penerimaan di bawah target yang ditetapkan terutama retribusi daerah, kondisi ini disebabkan oleh:

- 1) Penetapan target yang tidak berdasarkan data kenyataan di lapangan karena belum melalui survei terhadap potensi.
- 2) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
- 3) Perangkat hukum dan *law enforcement* yang mendukung pelaksanaan pemungutan pendapatan yang belum baik dan belum sesuai dengan kondisi lapangan.
- 4) Belum lengkapnya data tentang pajak dan retribusi daerah.
- 5) Perannya yang relatif kecil dalam total penerimaan daerah, sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat.
- 6) Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah, hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar.
- 7) Kurangnya koordinasi internal dan dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- 8) Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Optimalisasi sumber pendapatan perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan.

Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas penerimaan daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal.

Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial (kurang koordinasi), sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

2. PENDAPATAN TRANSFER.

Pendapatan Transfer merupakan akun yang menampung penerimaan transfer yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut :

- a. Dana Perimbangan;
 - 1) Dana Bagi Hasil;
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU);
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- b. Dana Insentif daerah; dan
- c. Dana Desa.

Pendapatan transfer Antar Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Bagi hasil; dan
- b. Bantuan Keuangan.

Adapun rincian dari Pendapatan Transfer dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 6. Target dan Realisasi Pendapatan Transfer

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.	1.137.908.313.913,00	1.116.029.110.626,00	98,08	1.115.655.117.433,00
	Dana Perimbangan	1.041.818.348.913,00	1.019.939.145.626,00	97,90	1.015.949.189.434,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	1.317.667.000,00	1.317.667.000,00	100,00	0,00
	Dana Desa	94.772.298.000,00	94.772.298.000,00	100,00	99.705.927.999,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.162.595.733,00	75.464.139.708,00	110,71	64.060.028.743,00
	Pendapatan Bagi Hasil	68.162.595.733,00	75.464.139.708,00	110,71	62.560.028.743,00
	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
	Jumlah	1.206.070.909.646,00	1.191.493.250.334,00	98,79	1.179.715.146.176,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2022 realisasi Penerimaan dari Pendapatan Transfer sebesar Rp1.191.493.250.334,00 atau 98,79%.

Jika dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Transfer tahun 2021 sebesar Rp1.179.715.146.176,00 maka penerimaan untuk tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp11.778.104.158,00 atau 1,00%.

Rincian Pendapatan Transfer sebagai berikut :

a. Transfer Pemerintah Pusat.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.116.029.110.626,00	1.115.655.117.433,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa, untuk tahun 2022 direncanakan sebesar Rp1.137.908.313.913,00 sedangkan realisasi sebesar Rp1.116.029.110.626,00 atau 98,08%.

Rincian Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 7. Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Dana Perimbangan	1.041.818.348.913,00	1.019.939.145.626,00	97,90	1.015.949.189.434,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	16.937.126.000,00	18.057.503.080,00	106,61	17.474.066.003,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	706.486.730.000,00	704.448.324.710,00	99,71	706.486.730.000,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	106.116.082.000,00	93.252.089.236,00	87,88	109.751.325.748,00

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	212.278.410.913,00	204.181.228.600,00	96,19	182.237.067.683,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	1.317.667.000,00	1.317.667.000,00	100,00	0,00
3	Dana Desa	94.772.298.000,00	94.772.298.000,00	100,00	99.705.927.999,00
	Jumlah	1.137.908.313.913,00	1.116.029.110.626,00	98,08	1.115.655.117.433,00

Dari tabel di atas terlihat realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Penerimaan Tahun 2021 sebesar Rp373.993.193,00 atau 0,03%.

Adapun dasar penganggaran Dana Transfer Tahun Anggaran 2022 adalah Peraturan Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan PMK Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Dampaknya.

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebagai berikut:

1) Dana Perimbangan.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.019.939.145.626,00	1.015.949.189.434,00

Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menargetkan Dana Perimbangan sebesar Rp1.041.818.348.913,00 yang terealisasi sebesar Rp1.019.939.145.626,00 atau 97,90%.

Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2021 sebesar Rp1.015.949.189.434,00 Realisasi tahun 2022 naik sebesar Rp3.989.956.192,00 atau 0,39%.

Rincian rencana dan realisasi penerimaan Dana Perimbangan sebagai berikut:

Tabel 5. 8. Target dan Realisasi Dana Perimbangan

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)	16.937.126.000,00	18.057.503.080,00	106,61	17.474.066.003,00

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
2	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)	706.486.730.000,00	704.448.324.710,00	99,71	706.486.730.000,00
3	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	106.116.082.000,00	93.252.089.236,00	87,88	109.751.325.748,00
4	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	212.278.410.913,00	204.181.228.600,00	96,19	182.237.067.683,00
Jumlah		1.041.818.348.913,00	1.019.939.145.626,00	97,90	1.015.949.189.434,00

Realisasi Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2022 merupakan Gabungan dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang masing-masingnya berjumlah Rp13.594.297.185,00 dan Rp4.463.205.895,00.

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH).

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
18.057.503.080,00	17.474.066.003,00

Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menargetkan Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp16.937.126.000,00 yang terealisasi sebesar Rp18.057.503.080,00 atau 106,61%.

Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 sebesar Rp17.474.066.003,00 realisasi Tahun 2022 meningkat sebesar Rp583.437.077,00 atau 3,34%.

Rincian rencana dan realisasi penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai berikut:

Tabel 5. 9. Target dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.022.352.756,00	6.084.000.714,00	101,02	7.575.313.697,00
2	DBH PPh Pasal 21	7.229.010.244,00	7.468.728.838,00	103,32	6.365.131.443,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00	0,00	0,00	263.228.610,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	39.616.000,00	41.567.633,00	104,93	64.159.809,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	516.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	625.805.000,00	851.066.752,00	136,00	681.801.615,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	638.499.406,00

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	932.319.000,00	1.524.116.143,00	163,48	0,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	129.712.000,00	129.712.000,00	100,00	299.451.946,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.585.963.477,00
Jumlah		16.937.126.000,00	18.057.503.080,00	106,61	17.474.066.003,00

b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
704.448.324.710,00	706.486.730.000,00

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp706.486.730.000,00 dan realisasi sebesar Rp704.448.324.710,00 atau 99,71%.

Dibandingkan realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2021 sebesar Rp706.486.730.000,00 penerimaan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.038.405.290,00 atau 0,29%.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
93.252.089.236,00	109.751.325.748,00

Tahun Anggaran 2022 penerimaan dari Dana Alokasi Khusus Fisik direncanakan sebesar Rp106.116.082.000,00 dan realisasi sebesar Rp93.252.089.236,00 atau 87,88%.

Dibandingkan realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021 sebesar Rp109.751.325.748,00 penerimaan Tahun 2022 turun sebesar Rp16.499.236.512,00 atau 15,03%.

d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
204.181.228.600,00	182.237.067.683,00

Tahun Anggaran 2022 penerimaan dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik direncanakan sebesar Rp212.278.410.913,00 dan realisasi sebesar Rp204.181.228.600,00 atau 96,19%.

Dibandingkan realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021 sebesar Rp182.237.067.683,00 penerimaan Tahun 2022 naik sebesar Rp21.944.160.917,00 atau 12,04%.

2) Dana Insentif Daerah (DID).

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
1.317.667.000,00	0,00

Tahun Anggaran 2022 penerimaan dari Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp1.317.667.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.317.667.000,00 atau 100,00%.

Dibandingkan dengan realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2021 sebesar Rp0,00 penerimaan Tahun 2022 meningkat sebesar Rp1.317.667.000,00.

3) Dana Desa.

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
94.772.298.000,00	99.705.927.999,00

Tahun Anggaran 2022 penerimaan dari Dana Desa direncanakan sebesar Rp94.772.298.000,00 dan realisasi sebesar Rp94.772.298.000,00 atau 100%.

Dibandingkan dengan realisasi Dana Desa Tahun 2021 sebesar Rp99.705.927.999,00 penerimaan Dana Desa Tahun 2022 turun sebesar Rp4.933.629.999,00 atau 4,95%.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
75.464.139.708,00	64.060.028.743,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022 merupakan penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi dalam bentuk Pendapatan Bagi Hasil yang ditargetkan sebesar Rp68.162.595.733,00 dan realisasi sebesar Rp75.464.139.708,00 atau 110,71%. Bila dibandingkan dengan Penerimaan Tahun 2021, pendapatan ini naik sebesar Rp11.404.110.965,00 atau 17,80%.

Tabel 5. 10. Target dan Realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan Bagi Hasil	68.162.595.733,00	75.464.139.708,00	110,71	62.560.028.743,00
2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
Jumlah		68.162.595.733,00	75.464.139.708,00	110,71	64.060.028.743,00

1) Pendapatan Bagi Hasil.

Tahun 2022 **Tahun 2021**
(Rp) **(Rp)**
75.464.139.708,00 **62.560.028.743,00**

Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2022 berasal dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp68.162.595.733,00 dan terealisasi sebesar Rp75.464.139.708,00 atau 110,71%. Dibanding penerimaan Tahun 2021 pendapatan ini mengalami peningkatan sebesar Rp12.904.110.965,00 atau 20,63%.

Dasar penganggaran dari Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2022 adalah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 971.1/007/Pjk-B.Keuda/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan alokasi definitif dan kekurangan salur dana bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Barat bagian kabupaten/kota se Sumatera Barat tahun anggaran 2021.

Sementara dasar pencantuman realisasi Pendapatan Bagi Hasil mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/06/Pjk-Bappenda/2023 Tanggal 25 Januari 2023 Tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

Tabel 5. 11. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.462.376.884,00	15.526.033.090,00	115,33	16.098.005.476,00
2	Bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.827.264.799,00	8.477.348.167,00	96,04	5.866.552.046,00
3	Bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29.466.024.567,00	31.280.133.881,00	106,16	22.937.237.688,00
4	Bagi hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	116.299.588,00	98.906.626,00	85,04	91.803.126,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	16.290.629.895,00	20.081.717.944,00	123,27	17.566.430.407,00
Jumlah		68.162.595.733,00	75.464.139.708,00	110,71	62.560.028.743,00

2) Bantuan Keuangan.

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	1.500.000.000,00

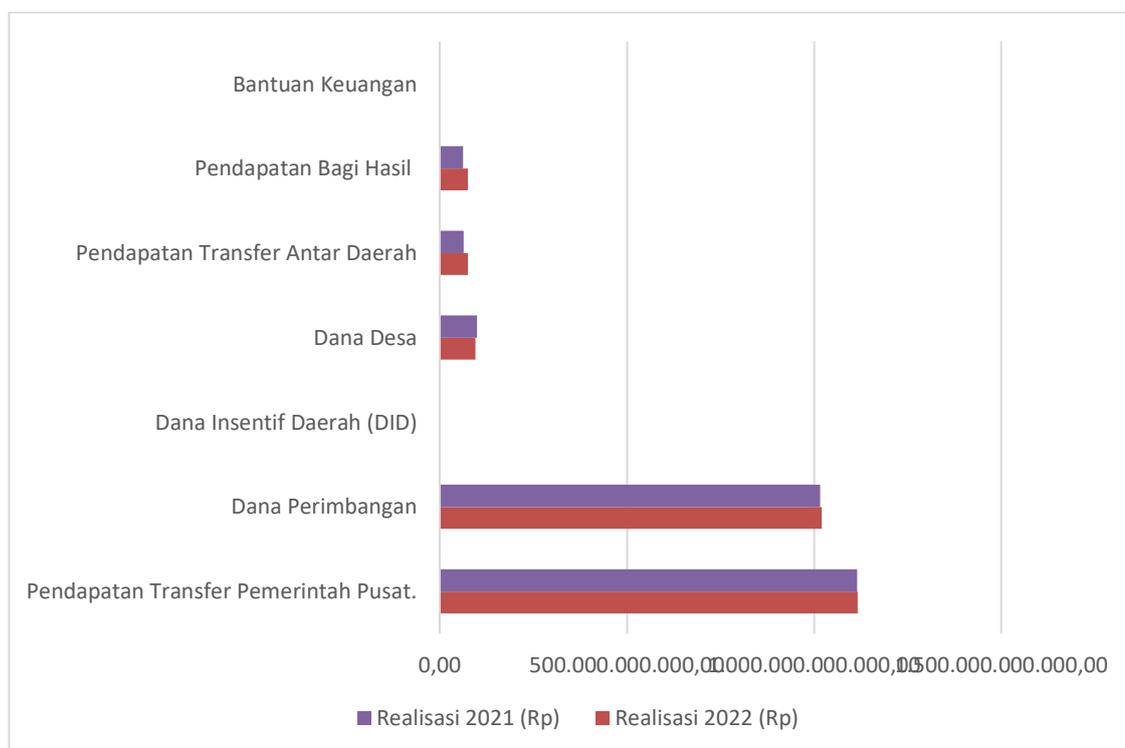
Bantuan Keuangan Tahun 2022 berasal dari Penerimaan yang Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp0,00 dan terealisasikan sebesar Rp0,00.

Tabel 5. 12. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00

Komposisi komponen Pendapatan Dana Transfer digambarkan dalam grafik dibawah ini.

Gambar 5. 5. Perbandingan Realisasi Dana Transfer Tahun 2022 - 2021



Dari gambar di atas, dapat disimpulkan pendapatan transfer Tahun 2022, komponen terbesar diperoleh dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH.

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
30.891.026.000,00	66.836.447.168,00

Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menganggarkan Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp44.592.026.000,00 dan terealisasi sebesar Rp30.891.026.000,00 atau 69,27%.

Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2021 sebesar Rp66.836.447.168,00 realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp35.945.421.168,00 atau 53,78%.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2022 merupakan Pendapatan Hibah.

Tabel 5. 13. Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan Hibah	44.592.026.000,00	30.891.026.000,00	69,27	7.462.975.000,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	59.373.472.168,00
Jumlah		44.592.026.000,00	30.891.026.000,00	69,27	66.836.447.168,00

a. Pendapatan Hibah.

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
30.891.026.000,00	66.836.447.168,00

Pendapatan hibah tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp44.592.026.000,00 dengan realisasi sebesar Rp30.891.026.000,00 yang merupakan pendapatan Hibah Pemerintah Pusat Untuk PDAM sebesar Rp1.299.000.000,00 dan Belanja Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tahap ke-1 TA 2022 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah (Hibah Rehab Rekon) sebesar Rp29.592.026.000,00.

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2021 sebesar Rp66.836.447.168,00 realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp35.945.421.168,00 atau 53,78%.

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
0,00	59.373.472.168,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp00 dan Rp59.373.472.168,00 mengalami penurunan sebesar Rp59.373.472.168,00 atau sebesar 100%.

Dari total realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 sebesar Rp1.348.628.181.500,28 dapat kita lihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 9,36%, kontribusi Pendapatan Transfer sebesar 88,35% dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 2,29%. Komposisi pendapatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 dan 2021 digambarkan dalam grafik di bawah ini:

Gambar 5. 6. Porsi Pendapatan Tahun 2022 dan 2021



Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap dana transfer masih cukup tinggi, yaitu sebesar 88,35%.

B. BELANJA DAERAH.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.314.912.642.338,42	1.326.677.906.468,67

Tahun Anggaran 2022 Belanja yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar Rp1.407.999.184.315,00 hingga tanggal 31 Desember 2022 belanja terealisasi sebesar Rp1.314.912.642.338,42 atau 93,39%.

Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.326.677.906.468,67 terjadi penurunan belanja sebesar Rp11.765.264.130,25 atau 0,89%.

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja Tahun 2022 dikelompokkan menjadi 4 (Empat) yaitu :

1. Belanja Operasi.
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal.
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga.
4. Belanja Transfer.
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Secara rinci rencana dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 14. Target dan Realisasi Belanja

NO.	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Operasi	1.045.016.233.134,00	1.006.898.685.609,42	96,35	1.010.763.437.309,67
2	Belanja Modal	185.756.480.341,00	135.087.564.500,00	72,72	137.156.605.722,00
3	Belanja Tidak Terduga	3.119.390.571,00	616.219.436,00	19,75	618.675.500,00
4	Belanja Transfer	174.107.080.269,00	172.310.172.793,00	98,97	178.139.187.937,00
	Jumlah	1.407.999.184.315,00	1.314.912.642.338,42	93,39	1.326.677.906.468,67

Tahun 2022 Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Rincian Belanja Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. BELANJA OPERASI.

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
1.006.898.685.609,42	1.010.763.437.309,67

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.045.016.233.134,00 dan terealisasi sebesar Rp1.006.898.685.609,42 atau 96,35%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.010.763.437.309,67 Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.864.751.700,25 atau 0,38%. Rincian Belanja Operasi sebagai berikut:

Tabel 5. 15. Target dan Realisasi Belanja Operasi

NO.	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Pegawai	694.082.621.125,00	672.789.484.454,42	96,93	710.253.561.401,67
2	Belanja Barang dan Jasa	335.943.137.589,00	319.270.104.255,00	95,04	290.925.392.498,00
3	Hibah	10.335.274.420,00	10.315.746.900,00	99,81	9.529.483.410,00
4	Bantuan Sosial	4.655.200.000,00	4.523.350.000,00	97,17	55.000.000,00
Jumlah		1.045.016.233.134,00	1.006.898.685.609,42	96,35	1.010.763.437.309,67

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

a. Belanja Pegawai.

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
672.789.484.454,42	710.253.561.401,67

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp694.082.621.125,00 dan telah terealisasi sebesar Rp672.789.484.454,42 atau 96,93%.

Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp710.253.561.401,67 Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 menurun sebesar Rp37.464.076.947,25 atau 5,27%.

Adapun rincian dari belanja pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 16. Target dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	409.380.788.236,00	404.263.372.994,42	98,75	417.067.226.792,75
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	99.147.462.701,00	95.895.024.321,00	96,72	89.803.070.573,92
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	145.105.720.000,00	134.823.296.090,00	92,91	157.871.157.959,00
4	Belanja Gaji dan tunjangan DPRD	15.740.205.829,00	15.508.508.033,00	98,53	15.531.614.220,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	550.224.058,00	483.789.034,00	87,93	376.925.796,00

No.	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	615.573.000,00	614.880.000,00	99,89	543.374.000,00
7	Belanja Honorarium Pengelola Dana Bos	0,00	0,00	0,00	15.548.060.250,00
8	Belanja Pegawai BLUD	23.542.647.301,00	21.200.613.982,00	90,05	13.512.131.810,00
JUMLAH		694.082.621.125,00	672.789.484.454,42	96,93	710.253.561.401,67

b. Belanja Barang dan Jasa.

Tahun 2022 **Tahun 2021**
(Rp) **(Rp)**
319.270.104.255,00 **290.925.392.498,00**

Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp335.943.137.589,00 dan direalisasikan sebesar Rp319.270.104.255,00 atau 95,04%.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp290.925.392.498,00 Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 meningkat sebesar Rp28.344.711.757,00 atau 9,74%.

Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa per komponen biaya Tahun 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 17. Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Barang Pakai Habis	83.133.420.466,00	79.973.210.997,00	96,20	71.407.430.083,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	450.000,00	2.300.000,00	511,11	0,00
3	Belanja Jasa Kantor	78.456.529.594,00	74.741.792.178,00	95,27	75.913.394.707,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.382.426.182,00	11.883.416.017,00	95,97	11.403.264.764,00
5	Belanja Sewa Tanah	5.000.000,00	2.500.000,00	50,00	42.583.215,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.453.883.000,00	3.159.515.992,00	91,48	1.802.139.417,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.490.095.000,00	3.220.863.050,00	92,29	4.003.657.400,00
8	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	68.250.000,00	66.000.000,00	96,70	66.000.000,00
9	Belanja Sewa Aset tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00
10	Belanja Jasa Konsultansi konstruksi	2.327.500.000,00	2.320.416.320,00	99,70	948.967.096,00
11	Belanja Jasa Konsultansi non konstruksi	541.684.500,00	397.375.800,00	73,36	313.014.500,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	148.419.000,00

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
13	Belanja Jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	697.000.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	5.258.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.760.160.690,00	2.501.031.957,00	90,61	3.327.113.261,00
16	Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.455.252.760,00	1.318.765.573,00	90,62	1.941.756.877,00
17	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.736.812.585,00	1.728.155.748,00	99,50	1.311.858.510,00
18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	63.757.476.025,00	57.118.729.296,00	89,59	49.338.264.850,00
19	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	214.585.000,00	148.941.370,00	69,41	0,00
20	Belanja uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.077.850.000,00	1.075.872.500,00	99,82	258.047.700,00
21	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	290.958.400,00	256.986.000,00	88,32	684.535.352,00
22	Belanja Barang dan Jasa BOS	47.412.220.723,00	46.940.955.534,00	99,01	32.687.304.790,00
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD	33.366.582.664,00	32.401.275.923,00	97,11	34.609.282.976,00
Jumlah		335.943.137.589,00	319.270.104.255,00	95,04	290.925.392.498,00

c. Belanja Hibah

Tahun 2022 **Tahun 2021**
(Rp) **(Rp)**
10.315.746.900,00 **9.529.483.410,00**

Belanja Hibah Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp10.335.274.420,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.315.746.900,00 atau 99,81%.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.529.483.410,00 Belanja Hibah Tahun 2022 naik sebesar Rp786.263.490,00 atau 8,25%.

Anggaran dan realisasi Belanja Hibah per komponen biaya Tahun 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 18. Target dan Realisasi Belanja Hibah

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.327.764.420,00	5.310.558.000,00	99,68	6.831.413.410,00
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.685.000.000,00	1.685.000.000,00	100,00	1.785.000.000,00

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
3	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.366.000.000,00	2.363.678.900,00	99,90	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	956.510.000,00	956.510.000,00	100,00	913.070.000,00
Jumlah		10.335.274.420,00	10.315.746.900,00	99,81	9.529.483.410,00

Tabel 5. 19. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

NO	NAMA PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1.	Hibah Kepada KONI	700.000.000,00
2.	Hibah Kepada Pramuka	700.000.000,00
3.	Hibah Kepada KNPI	150.000.000,00
4.	Hibah Kepada PMI	135.000.000,00
Jumlah		1.685.000.000,00

Tabel 5. 20. Target Dan Realisasi Hibah Kepada Partai Politik

No	Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Partai Nasional Demokrat	70.915.000,00	70.915.000,00	100,00	70.915.000,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa	76.565.000,00	76.565.000,00	100,00	76.565.000,00
3	Partai Keadilan Kesejahteraan	121.655.000,00	121.655.000,00	100,00	121.655.000,00
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	43.440.000,00	43.440.000,00	100,00	-
5	Partai Golongan Karya	90.820.000,00	90.820.000,00	100,00	90.820.000,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	164.355.000,00	164.355.000,00	100,00	164.355.000,00
7	Partai Demokrat	95.830.000,00	95.830.000,00	100,00	95.830.000,00
8	Partai Amanat Nasional	158.010.000,00	158.010.000,00	100,00	158.010.000,00
9	Partai Persatuan Pembangunan	95.585.000,00	95.585.000,00	100,00	95.585.000,00
10	Partai Hati Nurani Rakyat	39.335.000,00	39.335.000,00	100,00	39.335.000,00
Total		956.510.000,00	956.510.000,00	100,00	913.070.000,00

d. Bantuan Sosial

Tahun 2022
(Rp)
4.523.350.000,00

Tahun 2021
(Rp)
55.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp4.655.200.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.523.350.000,00 atau 97,17%.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp55.000.000,00 realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 bertambah sebesar Rp4.468.350.000,00 atau 8.124,27%.

Belanja Bantuan Sosial tersebut merupakan belanja bantuan sosial stimulasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

Daftar Penerima Bantuan Sosial di Tahun 2022, dapat dilihat pada Lampiran 1.

2. BELANJA MODAL.

Tahun 2022 **Tahun 2021**
(Rp) **(Rp)**
135.087.564.500,00 **137.156.605.722,00**

Belanja Modal ini merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun). Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp185.756.480.341,00 dan direalisasikan sebesar Rp135.087.564.500,00 atau 72,72%.

Dibandingkan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp137.156.605.722,00 Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 turun sebesar Rp2.069.041.222,00 atau 1,51%.

Anggaran dan realisasi belanja modal per komponen biaya Tahun 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 21. Target dan Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.058.285.482,00	30.445.954.899,00	98,03	41.764.570.225,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.679.258.220,00	34.708.818.439,00	85,32	39.598.237.372,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	110.399.646.865,00	66.520.884.059,00	60,25	51.222.179.171,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.619.289.774,00	3.411.907.103,00	94,27	4.571.618.954,00
Jumlah		185.756.480.341,00	135.087.564.500,00	72,72	137.156.605.722,00

Rincian Belanja Modal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Tahun 2022 **Tahun 2021**
(Rp) **(Rp)**
30.445.954.899,00 **41.764.570.225,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp31.058.285.482,00 dan direalisasikan sebesar Rp30.445.954.899,00 atau 98,03%.

Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp41.764.570.225,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 turun sebesar Rp11.318.615.326,00 atau 27,10%.

Tabel 5. 22. Target dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	2.395.800.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - alat Bantu	0,00	0,00	0,00	28.260.000,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Alat Angkutan Darat Bermotor	1.903.750.000,00	1.872.393.575,00	98,35	2.455.334.466,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Alat Ukur	1.647.406.000,00	1.647.406.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Alat Pengolahan	120.500.000,00	92.785.950,00	77,00	661.920.379,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Alat Kantor	599.352.100,00	556.409.649,00	92,84	477.925.000,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Alat Rumah Tangga	1.365.798.000,00	1.257.587.800,00	92,08	2.764.362.280,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	495.728.000,00	475.519.000,00	95,92	395.330.240,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Alat Studio	142.433.391,00	136.843.975,00	96,08	232.513.500,00
10	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.414.186.600,00	5.240.975.644,00	96,80	18.247.124.772,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Alat Laboratorium	1.661.899.998,00	1.572.180.432,00	94,60	51.339.000,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Peraga/Praktek Sekolah	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	297.726.000,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Komputer Unit	7.202.109.979,00	7.121.084.489,00	98,87	2.890.882.409,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Peralatan Komputer	756.644.735,00	716.002.660,00	94,63	467.439.654,00
16	Belanja Modal Peralatan Olahraga	12.310.000,00	8.991.000,00	73,04	0,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BOS	6.464.373.213,00	6.995.928.330,00	108,22	7.582.672.472,00
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin –BLUD	3.268.493.466,00	2.751.846.395,00	84,19	2.815.940.053,00
Jumlah		31.058.285.482,00	30.445.954.899,00	98,03	41.764.570.225,00

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
34.708.818.439,00	39.598.237.372,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp40.679.258.220,00 dan direalisasikan sebesar Rp34.708.818.439,00 atau 85,32%.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan ini digunakan untuk pembangunan gedung dan bangunan baru serta perbaikan/rehab gedung dan bangunan lama sehingga dapat menambah umur ekonomis bangunan tersebut.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp39.598.237.372,00 realisasi anggaran Tahun 2022 turun sebesar Rp4.889.418.933,00 atau 12,35%.

Tabel 5. 23. Target dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	40.461.758.220,00	34.500.465.371,00	85,27	38.776.669.897,00
2	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	112.500.000,00	112.200.000,00	99,73	523.771.827,00
3	Belanja Modal dan Bangunan BLUD	105.000.000,00	96.153.068,00	91,57	297.795.648,00
Jumlah		40.679.258.220,00	34.708.818.439,00	85,32	39.598.237.372,00

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
66.520.884.059,00	51.222.179.171,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp110.399.646.865,00 dan direalisasikan sebesar Rp66.520.884.059,00 atau 60,25%.

Belanja ini umumnya digunakan untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan rutin/periodik jalan dan jembatan serta jaringan air oleh Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang.

Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp51.222.179.171,00 realisasi Tahun 2022 naik sebesar Rp15.298.704.888,00 atau 29,87%.

Dalam Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi diatas sudah termasuk Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Dana BLUD Rp153.896.926,00.

Tabel 5. 24. Target dan Realisasi Belanja Modal, Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Jalan	66.209.198.606,00	47.929.520.107,00	72,39	34.966.165.246,00
2	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Jembatan	15.103.520.839,00	10.195.249.486,00	67,50	3.865.673.000,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	27.928.387.420,00	7.250.105.602,00	25,96	10.539.920.236,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	734.600.000,00	732.377.938,00	99,70	1.691.828.000,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Instalasi Air Kotor	254.310.000,00	252.419.000,00	99,26	0,00
6	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Jaringan Listrik	14.630.000,00	7.315.000,00	50,00	147.105.389,00
7	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	155.000.000,00	153.896.926,00	99,29	11.487.300,00
Jumlah		110.399.646.865,00	66.520.884.059,00	60,25	51.222.179.171,00

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Tahun 2022 **Tahun 2021**
(Rp) **(Rp)**
3.411.907.103,00 **4.571.618.954,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp3.619.289.774,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.411.907.103,00 atau 94,27%.

Belanja ini dipergunakan untuk pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori empat jenis belanja modal tersebut di atas, seperti pengeluaran untuk pembelian buku, pembelian tanaman, bibit dan barang bercorak seni dan budaya.

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp4.571.618.954,00 realisasi Tahun 2022 turun sebesar Rp1.159.711.851,00 atau 25,37%.

Tabel 5. 25. Target dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	33.675.000,00	31.708.000,00	94,16	234.700.000,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Modal Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	29.860.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	270.964.304,00
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	30.950.000,00	30.690.633,00	99,16	6.550.000,00
6	Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS	3.518.306.064,00	3.322.186.370,00	94,43	4.029.544.650,00

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
7	Belanja Modal Aset Tetap lainnya BLUD	31.358.710,00	22.322.100,00	71,18	0,00
Jumlah		3.619.289.774,00	3.411.907.103,00	94,27	4.571.618.954,00

3. BELANJA TIDAK TERDUGA.

Tahun 2022 Tahun 2021
(Rp) (Rp)
616.219.436,00 618.675.500,00

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp3.119.390.571,00 dan direalisasikan sebesar Rp616.219.436,00 atau sebesar 19,75%.

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp618.675.500,00 realisasi Tahun 2022 turun sebesar Rp2.456.064,00 atau sebesar 0,40%.

Belanja ini dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, pengembalian pendapatan tahun lalu dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

4. BELANJA TRANSFER.

Tahun 2022 Tahun 2021
(Rp) (Rp)
172.310.172.793,00 178.139.187.937,00

Belanja Transfer merupakan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Tahun Anggaran 2022 Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp174.107.080.269,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp172.310.172.793,00 atau 98,97%.

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp178.139.187.937,00 realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.829.015.145,00 atau 3,27%.

Tabel 5. 26. Target Dan Realisasi Belanja Transfer

No	Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	6.992.396.669,00	5.449.491.303,00	77,93	4.722.352.138,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	6.658.682.804,00	5.184.288.467,00	77,86	4.518.974.804,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	333.713.865,00	265.202.836,00	79,47	203.377.334,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	167.114.683.600,00	166.860.681.490,00	99,85	173.416.835.800,00

No	Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	167.114.683.600,00	166.860.681.490,00	99,85	173.416.835.800,00
	Total	174.107.080.269,00	172.310.172.793,00	98,97	178.139.187.938,00

a. Belanja Bagi Hasil.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.449.491.303,00	4.722.352.138,00

Belanja bagi hasil tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp6.992.396.669,00 dan terealisasi sebesar Rp5.449.491.303,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp4.722.352.138,00 mengalami kenaikan sebesar Rp727.139.165,00 atau 15,40%.

1) Bagi Hasil Pajak Daerah.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.184.288.467,00	4.518.974.804,00

Rencana pengeluaran Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2022 sebesar Rp6.658.682.804,00 telah direalisasikan sebesar Rp5.184.288.467,00 atau 77,86%.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp4.518.974.804,00. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2022 meningkat sebesar Rp665.313.663,00 atau 14,72%.

Rincian Transfer Bagi hasil Pajak Daerah sebagai berikut :

Tabel 5. 27. Target Dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

No	Uraian	Jumlah
1	Pembayaran dana bagi hasil pajak dan retribusi atas kekurangan pembayaran tahun 2021 untuk 103 Nagari berdasarkan Keputusan Bupati No.397/KEP/2022	1.103.682.803,00
2	Permintaan pembayaran dana bagi hasil pajak dan retribusi untuk 103 nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022, berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman No.491/KEP/BPP/2022	4.080.605.664,00
JUMLAH		5.184.288.467,00

2) Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
265.202.836,00	203.377.334,00

Rencana pengeluaran Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun 2022 sebesar Rp333.713.865,00 telah direalisasikan sebesar Rp265.202.836,00 atau 79,47%.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp203.377.334,00. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2022 bertambah sebesar Rp61.825.502,00 atau 30,40%.

Rincian Transfer Bagi hasil Retribusi Daerah sebagai berikut :

Tabel 5. 28. Target Dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

No	Uraian	Jumlah
1	Pembayaran dana bagi hasil pajak dan retribusi atas kekurangan pembayaran tahun 2021 untuk 103 Nagari berdasarkan Keputusan Bupati No.397/KEP/2022	77.463.828,00
2	Permintaan pembayaran dana bagi hasil pajak dan retribusi untuk 103 nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022, berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman No.491/KEP/BPP/2022	187.739.008,00
JUMLAH		265.202.836,00

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
166.860.681.490,00	173.416.835.799,00

Rencana pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan tahun 2022 sebesar Rp167.114.683.600,00 telah direalisasikan sebesar Rp166.860.681.490,00 atau 99,85%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp173.416.835.799,00. Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.556.154.310,00 atau 3,78%.

Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari :

1) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota Kepada Desa sebesar Rp166.860.681.490,00 yang merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang terdiri dari :

a) Dana Desa (Nagari) sebesar Rp94.772.298.000,00.

Dana Desa merupakan dana yang diperuntukan bagi desa atau nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang disalurkan kepada pemerintah Nagari yang mana mekanisme penyalurannya tidak melalui Kas Umum Daerah. Penyaluran Dana Desa langsung ditransfer dari KPPN ke rekening Desa (Nagari).

b) Alokasi Dana Nagari sebesar Rp35.499.783.490,00.

Alokasi Dana Nagari merupakan Dana yang dianggarkan Pemerintah Daerah dengan yang diperuntukan bagi Nagari sesuai peraturan perundang-undangan dan disalurkan kepada pemerintah Nagari melalui kas umum daerah.

c) SILTAP sebesar Rp36.588.600.000,00.

Daftar Transfer Bantuan Keuangan ke Desa di Tahun 2022, dapat dilihat pada Lampiran 2.

C. SURPLUS / (DEFISIT).

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
33.715.539.161,86	36.776.375.524,28

Surplus/defisit anggaran merupakan pengurangan total pendapatan daerah dengan belanja daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 direncanakan defisit sebesar Rp(31.346.870.233,00) dan realisasinya surplus sebesar Rp33.715.539.161,86 atau (107,56)%.

D. PEMBIAYAAN.

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
45.047.870.233,43	9.570.494.709,15

Rencana dan realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan.

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
46.346.870.233,43	17.031.494.709,15

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp46.346.870.233,00 dan realisasinya sebesar Rp46.346.870.233,43 atau sebesar 100%.

Adapun rincian realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 adalah Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya sebesar Rp46.346.870.233,43 sebagai berikut :

a. Sisa Dana Alokasi Fisik	Rp5.892.458.805,00
b. Sisa Dana Alokasi Non Fisik	Rp19.405.240.723,00
c. SiLPA Dana Transfer ke Desa/Nagari	Rp1.181.146.668,00

d. SiLPA DID Tambahan	Rp774.065.987,00
e. SiLPA Dana BOS	Rp120.157.100,00
f. SiLPA BLUD	Rp3.479.384.357,00
g. SiLPA BKK	Rp233.832.000,00
h. SiLPA Kegiatan	Rp15.260.584.593,43
JUMLAH	Rp46.346.870.233,43

2. Pengeluaran Pembiayaan.

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
1.299.000.000,00	7.461.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 direncanakan Rp15.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.299.000.000,00 atau 8,66%.

Dibandingkan realisasi Tahun 2021 yaitu sebesar Rp7.461.000.000,00 Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 berkurang sebesar Rp6.162.000.000,00 atau 82,59%.

Adapun rincian realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 29. Target Dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No.	URAIAN	JUMLAH
1	Pembayaran Hibah PDAM Tahap I tahun 2022	361.598.100,00
2	Pembayaran dana penyertaan modal PDAM Kab.Padang Pariaman untuk kegiatan program hibah air minum perkotaan MBR 2022	937.401.900,00
Jumlah		1.299.000.000,00

E. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN.

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
78.763.409.395,29	46.346.870.233,43

Selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan merupakan pembiayaan netto Tahun 2022, pembiayaan netto direncanakan sebesar Rp31.346.870.233,00 dan realisasinya sebesar Rp45.047.870.233,43.

Pembiayaan netto ditambah dengan surplus anggaran, merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Jumlah SiLPA akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp78.763.409.395,29. Dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2021 sebesar Rp46.346.870.233,43 maka SiLPA Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp32.416.539.161,86 atau 69,94%.

Adapun rincian SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp78.763.409.395,29:

Kas di Kas Daerah	Rp	73.254.300.095,47
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	12.703,00
Kas BLUD	Rp	5.365.365.110,82
Kas Bos	Rp	143.751.486,00
Utang PFK	Rp	(20.000,00)
Jumlah	Rp	78.763.409.395,29
SiLPA	Rp	78.763.409.395,29
Selisih	Rp	0,00

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SISA LEBIH (LPSAL).

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal.
Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2022 sebesar Rp46.346.870.233,43.
- b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan.
Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Penggunaan SAL Tahun 2022 merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp46.346.870.233,43.
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp78.763.409.395,29.
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.
Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.
- e. Saldo Anggaran Lebih pada tahun 2022 sebesar Rp78.763.409.395,29 yang terdiri dari:

Tabel 5. 30. Rincian SILPA

No	Uraian	Saldo
1	2	3
A	DAK Fisik Reguler	
1.	DAK Bidang Pendidikan	
	A DAK Pendidikan (PAUD)	501,00
	B DAK Pendidikan (SD)	753.133.720,00
	C DAK Pendidikan (SMP)	586.900,00
	D DAK Pendidikan (SKB)	300.197.202,00
	E DAK Pendidikan (Perpustakaan Daerah)	400,00
2.	DAK Bid. Kesehatan dan KB	
	A DAK Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Dasar)	1.723.076.400,00
	B DAK Kesehatan (Kesiapan Sistem Kesehatan)	18.448.000,00
	C DAK Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Rujukan)	888.402.923,00
	D DAK Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Rujukan) - Sekaligus – RSUD	0,00
	E DAK Kesehatan (Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan)	202.511.637,00
	F DAK Kesehatan (Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi)	0,00
	G DAK Kesehatan (Keluarga Berencana)	9.621.734,00

3.	DAK Sanitasi	5.950.000,00
4.	DAK Perumahan dan Pemukiman	186.932.000,00
5.	DAK Pertanian	0,00
6.	DAK Kelautan dan Perikanan	0,00
7.	DAK Pariwisata	0,00
8.	DAK Bid. Jalan (Prioritas Daerah)	1.671.695.000,00
9.	DAK Air Minum	350.231.000,00
10	DAK Industri Kecil dan Menengah	0,00
	Jumlah DAK Fisik Reguler	6.110.787.417,00
B	DAK Fisik Penugasan	
1.	DAK Penugasan Bid. Kesehatan	0,00
	a DAK Penugasan Bid. Kesehatan (Unit Transfusi Darah)	0,00
	b DAK Penugasan Bid. Kesehatan (Penurunan Stunting)	0,00
	c DAK Penugasan Bid. Kesehatan (Pengendalian Penyakit)	50,00
	d DAK Penugasan Bid. Kesehatan (Keluarga Berencana)	0,00
2.	DAK Penugasan Bid. Air Minum	10.797.000,00
3.	DAK Penugasan Bid. Sanitasi	0,00
4.	DAK Penugasan Bid. Pasar	0,00
5.	DAK Penugasan Lingkungan Hidup	0,00
6.	DAK Penugasan Bid. Irigasi	39.662.600,00
7.	DAK Penugasan Bid. Pertanian	100.243.500,00
8.	DAK Penugasan Bid. Industri Kecil dan Menengah	1.354.295.270,00
9.	DAK Penugasan Bid. Kelautan dan Perikanan	14.330.300,00
10.	DAK Penugasan Bid. Pariwisata	67.181.972,00
11.	DAK Penugasan Bid. Keselamatan Jalan	258.025.471,00
12.	DAK Penugasan Bid. Jalan (Tematik Ketahanan Pangan)	2.983.402.000,00
	Jumlah DAK Fisik Penugasan	4.827.938.163,00
	Jumlah DAK Fisik Reguler dan Penugasan	10.938.725.580,00
C	DAK Non Fisik	
1.	DAK Non Fisik (BOS REGULER)	143.751.486,00
2.	DAK Non Fisik (BOP PAUD)	732.632.490,00
3.	DAK Non Fisik (TPG)	758.220.085,00
4.	DAK Non Fisik (Tamsil Guru)	850.000,00
5.	DAK Non Fisik (BOK)	6.362.162.531,00
6.	DAK Non Fisik (Akreditasi Puskesmas)	0,00
7.	DAK Non Fisik (Jampersal)	0,00
8.	DAK Non Fisik (BOKT)	2.308.000,00
9.	DAK Non Fisik (BOKB)	1.543.855.091,00
10.	DAK Non Fisik (Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan)	95.186,00
11.	DAK Non Fisik (BOP Pendidikan Kesetaraan)	688.454.100,00
12.	DAK Non Fisik (Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM)	0,00
13.	DAK Non Fisik (Pelayanan Kepariwisata)	1.441.000,00

14.	DAK Non Fisik (Tunjangan Khusus Guru)	0,00
15.	DAK Non Fisik (Pengawasan Obat dan Makanan)	0,00
16.	DAK Non Fisik (Akreditasi LABKESDA)	0,00
17.	DAK Non Fisik (Fasilitasi Penanaman Modal)	312.100,00
18.	DAK Non Fisik (Ketahanan Pangan dan Pertanian)	800.000,00
19.	DAK Non Fisik PK2SIKM	136.048.015,00
Jumlah DAK Non Fisik		10.370.930.084,00
Total DAK		21.309.655.66400
D	Diluar DAK	
1.	SiLPA Dana Batuan BNPB	29.592.026.000,00
2.	SiLPA Dana Transfer ke Desa/Nagari	1.001.155.682,22
3.	SiLPA DID Tambahan	817.561.607,00
5.	SiLPA BLUD	5.365.365.110,82
6.	SiLPA Kegiatan	20.677.645.331,25
Jumlah SiLPA Diluar DAK		57.453.753.731,29
Total SiLPA		78.763.409.395,29

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA DAERAH.

Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2022 dengan total nilai Aset sebesar Rp1.340.357.325.040,66 Kewajiban sebesar Rp16.098.971.888,22 dan Ekuitas sebesar Rp1.324.258.353.152,43.

Rincian masing-masing pos di neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

A. ASET LANCAR.

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
118.051.118.283,61	86.641.386.792,17

Aset Lancar adalah Kas dan Setara Kas yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai untuk dimiliki atau dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan.

Pada 31 Desember 2022 Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berjumlah Rp118.051.118.283,61 yang terdiri atas :

1. Kas di Kas Daerah.

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
73.254.300.095,47	42.747.348.776,43

Berdasarkan Saldo Kas Daerah pembukuan per 31 Desember 2022 sebesar Rp73.254.300.095,47 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp42.747.348.776,43.

Sedangkan pada rekening koran Kas Umum Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp73.296.968.127,53 yang disimpan di Rekening Kas Umum Daerah Nomor 1700.0101.00052.9 Bank Nagari Cabang Lubuk Alung, sehingga terdapat selisih sebesar Rp42.668.032,06, dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan Kota Pariaman (2016)	Rp	811.000,00
Kurang Catat SP2D No. 1681 oleh Bank (2016)	Rp	8,00
Lebih Catat Saldo Awal oleh Bank (2016)	Rp	0,06
Koreksi PBB Pajak Yang di Potong Bank (2016)	Rp	20,00
Pajak Yang Dipotong Bank (2016)	Rp	(339,00)
Pajak Yang Dipotong Bank (2017)	Rp	32.336,00
Kas yang dibatasi penggunaannya atas jaminan reklamasi yang sudah direklas ke asset lain-lain.	Rp	41.824.407,00
kesalahan bank dalam mencairkan 0222/sp2d- ls/gj/bud/2022 sebesar Rp600,00	Rp	600,00
Jumlah	Rp	42.668.032,06

2. Kas di Bendahara Pengeluaran.

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
12.703,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.703,00 sedangkan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp12.703,00 terdiri atas:

- Kas pada bendahara pengeluaran Dinas PUPR sebesar Rp2.500,00 merupakan kurang transfer uang perjalanan dinas kepada Indra Utama, AP. M.Si sebesar Rp2.000,00 dan kurang setor belanja makan minum pada toko Nandifa Snak sebesar Rp500,00 atas kejadian tersebut bendahara pengeluaran telah menyetorkannya ke Kas Daerah tanggal 3 Januari 2023.
- Kas pada bendahara pengeluaran Kecamatan Nan Sabaris sebesar Rp10.203,00, merupakan jasa giro yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2022 dan atas kejadian tersebut bendahara pengeluaran Kecamatan Nan Sabaris telah menyetor pada tanggal 9 Januari 2023.

3. Kas di BLUD.

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
5.365.365.110,82	3.479.384.357,00

Kas di BLUD per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp5.365.365.110,82 dan Rp3.479.384.357,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 31. Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	Saldo Akhir	Rincian Saldo Akhir	
			Bank	Tunai
1	Puskesmas Anduring	1.030.790,00	1.030.790,00	0,00
2	Puskesmas Batu Basa	11.112.705,00	11.112.705,00	0,00
3	Puskesmas Gasan Gadang	14.418.280,00	14.418.280,00	0,00
4	Puskesmas Ketaping	39.087,00	39.087,00	0,00
5	Puskesmas Kampung Dalam	1.278.347,00	1.278.347,00	0,00
6	Puskesmas Kampung Guci	27.653.875,00	27.653.875,00	0,00
7	Puskesmas Koto Bangko	0,00	0,00	0,00
8	Puskesmas Kayu Tanam	13.779.571,00	13.779.571,00	0,00

No	Uraian	Saldo Akhir	Rincian Saldo Akhir	
			Bank	Tunai
9	Puskesmas Limau Purut	6.086.672,00	6.086.672,00	0,00
10	Puskesmas Lubuk Alung	28.244.740,32	28.244.740,32	0,00
11	Puskesmas Padang Alai	0,00	0,00	0,00
12	Puskesmas Padang Sago	3.229.716,00	3.229.716,00	0,00
13	Puskesmas Enam Lingkung	0,00	0,00	0,00
14	Puskesmas Pasar Usang	22.650.170,00	22.650.170,00	0,00
15	Puskesmas Patamuan	0,00	0,00	0,00
16	Puskesmas Sungai Geringging	0,00	0,00	0,00
17	Puskesmas Sungai Limau	1.649.570,00	1.649.570,00	0,00
18	Puskesmas Sungai Sarik	2.382.317,00	2.382.317,00	0,00
19	Puskesmas Sicincin	100.000,00	100.000,00	0,00
20	Puskesmas Sikabu	826,00	826,00	0,00
21	Puskesmas Sintuk	0,00	0,00	0,00
22	Puskesmas Ulakan	0,00	0,00	0,00
23	Puskesmas Pauh Kamar	0,00	0,00	0,00
24	Puskesmas Ampalu	0,00	0,00	0,00
25	Puskesmas Sikucur	0,00	0,00	0,00
26	RSUD Parit Malintang	5.231.708.444,50	5.231.708.444,50	0,00
Jumlah		5.365.365.110,82	5.365.365.110,82	0,00

4. Kas di Bendahara BOS.

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
143.751.486,00	120.157.100,00

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp143.751.486,00 dan Rp120.157.100,00. Saldo Kas sebesar Rp143.751.486,00 terdiri dari Kas di Bank sebesar Rp96.931.770,00 dan Kas Tunai sebesar Rp46.819.716,00 yang dikelola oleh Sekolah SD dan SMP. Saldo kas dibank sebesar Rp96.931.770,00 disimpan di buku tabungan dan buku giro dengan rincian masing-masing sebesar Rp94.941.408,00 dan Rp1.990.362,00.

Rincian Kas di Bendahara BOS dapat dilihat pada Lampiran 3.

5. Piutang Pajak Daerah.

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
47.004.150.766,00	40.886.755.856,00

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp47.004.150.766,00 dan Rp40.886.755.856,00 Saldo per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 dari :

Tabel 5. 32. Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Piutang Pajak Reklame	61.568.550,00	69.551.550,00
2.	Piutang Pajak Air Tanah	90.550.307,00	17.819.604,00
3.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	46.852.031.909,00	40.799.384.702,00
Jumlah		47.004.150.766,00	40.886.755.856,00

a) Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2022 sebesar Rp61.568.550,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2021	Rp	69.551.550,00
Surat Ketetapan Pajak (SKP) 2022	Rp	1.006.251.565,00
Penerimaan 2022	Rp	(1.014.234.565,00)
Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2022	Rp	61.568.550,00

Rincian Piutang Pajak Reklame per Wajib Pajak dapat dilihat pada Lampiran 4b.

b) Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp90.550.307,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2021	Rp	17.819.604,00
Surat Ketetapan Pajak (SKP) 2022	Rp	1,249,987,171.00
Penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2022	Rp	(1.177.256.468,00)
Jasa Transaksi Antar Bank	Rp	
Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2022	Rp	90.550.307,00

Rincian Piutang Pajak Air Tanah per wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 5. 33. Pajak Air Tanah

No.	Wajib Pajak	Tahun	Jumlah (Rp)
1	PT. KUNANGO JANTAN	2015	157.534,00
2	PT. BETA FARMA	2015	100.000,00
3	PT. ANUGRAH JAYA MANDIRI	2016	281.634,00
4	PT. BUANA LESTARI	2017	1.663.506,00
5	PT. JAPFA COMFEED KY.TNM	2017	40,00
6	PT. TRISURI INDAH FARM	2018	2.960.770,00
7	PT. MULTIKON JAGAD PERKASA	2020	437.964,00
8	PT. USAHA INTI PADANG	2020	685,00
9	PT. USAHA INTI PADANG	2021	270,00

No.	Wajib Pajak	Tahun	Jumlah (Rp)
10	PT. SRI JANYA AGRO	2022	2517268 ,00
11	PT. SRI JANYA AGRO	2022	2.384.812,00
12	PT. MULTIKON JAGAD PERKASA	2022	1.382.932,00
13	PT. SRI JANYA AGRO	2022	3.089.163,00
14	PT. MULTIKON JAGAD PERKASA	2022	1.382.932,00
15	PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM	2022	32.061.131,00
16	PT. SRI JANYA AGRO	2022	397.400,00
17	PT. BUANA LESTARI	2022	1.855.288,00
18	PT. KUNANGO JANTAN	2022	6.002.646,00
19	PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM	2022	32.026.839,00
20	PT. SRI JANYA AGRO	2022	1.847.493,00
Jumlah			90.550.307,00

c) Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.852.031.909,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Saldo Piutang PBB P2 per 31 Desember 2021	Rp	40.799.384.702,00
Surat Ketetapan Pajak (SKP) 2022	Rp	13.724.060.998,00
Penerimaan Pajak PBB Tahun 2022	Rp	(9.287.101.106,00)
Penyesuaian atas Denda Pajak PBB	Rp	315.290.875,00
Koreksi Saldo Awal (kurang Catat) Piutang PBBP2	Rp	1.300.396.440,00
Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2022	Rp	46.852.031.909,00

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp46.852.031.909,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Piutang PBB-P2 tahun 2009 s.d 2013 diserahkan oleh Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang ke Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan:

1. Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor: BA-23/WPJ.27/KP.04/2013 tanggal 19 Desember 2013.
2. Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor: BA-07/WPJ.27/KP.04/2014, tanggal 24 Januari 2014.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor : BA-07/WPJ.27/KP.04/2014 tanggal 24 Januari 2014 nilai piutang PBB P2 dialihkan ke Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp18.198.672.111,00.

b. Piutang PBB P2 tahun 2009 sampai dengan 2022 per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 34. Piutang PBB P2

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Piutang PBBP2 Tahun 2009	2.843.675.290,00
2.	Piutang PBBP2 Tahun 2010	2.911.173.985,00
3.	Piutang PBBP2 Tahun 2011	4.152.722.763,00
4.	Piutang PBBP2 Tahun 2012	3.717.761.420,00
5.	Piutang PBBP2 Tahun 2013	4.573.338.653,00
6.	Piutang PBBP2 Tahun 2014	2.519.890.109,00
7.	Piutang PBBP2 Tahun 2015	2.257.591.344,00
8.	Piutang PBBP2 Tahun 2016	2.295.932.216,00
9.	Piutang PBBP2 Tahun 2017	2.278.568.585,00
10.	Piutang PBBP2 Tahun 2018	2.871.241.956,00
11.	Piutang PBBP2 Tahun 2019	3.808.625.377,00
12.	Piutang PBBP2 Tahun 2020	3.914.445.100,00
13.	Piutang PBBP2 Tahun 2021	3.712.950.574,00
14.	Piutang PBBP2 Tahun 2022	4.994.114.537,00
Jumlah		46.852.031.909,00

Rincian Piutang PBB P2 dapat dilihat pada Lampiran 4a.

6. Piutang Retribusi.

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
572.032.650,00	955.352.650,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp572.032.650,00 dan Rp955.352.650,00. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 merupakan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp572.032.650,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 35. Piutang Retribusi

No.	Uraian	Jumlah
1	PT. Centratama Menara berdasarkan SKRD Tahun 2020 dan 2021	Rp70.500.000,00
2	PT. Akses Prima Indonesia berdasarkan SKRD Tahun 2019, 2020 dan 2021	Rp14.250.000,00
3	PT. Tower Bersama Group (TBG) berdasarkan SKRD tahun 2021	Rp2.750.000,00
4	PT. Mega Tower berdasarkan SKRD tahun 2015, 2018, 2019, 2020, dan 2021	Rp56.060.729,00
5	PT. XL Axiata berdasarkan SKRD tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021	Rp118.750.000,00

No.	Uraian	Jumlah
6	PT. Solusi Tunas Pratama berdasarkan SKRD tahun 2020 dan 2021	Rp44.750.000,00
7	PT. Infrasy Persada berdasarkan SKRD tahun 2015, 2018, 2019, 2020 dan 2021	Rp19.784.263,00
8	PT. Indosat berdasarkan SKRD tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021	Rp118.750.000,00
9	PT. Telkomsel berdasarkan SKRD tahun 2013, 2018, 2019, 2020 dan 2021	Rp6.937.658,00
10	PT. Inti Bangun Sejahtera berdasarkan SKRD tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021	Rp41.250.000,00
11	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia berdasarkan SKRD tahun 2022	Rp78.250.000,00
JUMLAH		Rp572.032.650,00

7. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah.

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
112.952.405.20,00	50.091.518,00

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp112.952.405.20,00 dan Rp50.091.518,00.

Total Piutang Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2022 sebesar Rp135.324.407,00 terdiri atas:

1. Saldo Piutang BLUD	Rp 102.357.189,00
2. Saldo Piutang Bunga Dana Bos	Rp 10.205.767,00
3. Saldo Piutang Remunirasi TDF	Rp 389.449,20
Jumlah	Rp112.952.405,20

Piutang BLUD terdiri atas piutang BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Piutang BLUD RSUD 31 Desember 2021	Rp 4.462.800,00
Penerimaan Piutang Tahun 2022	Rp (1.504.450,00)
Piutang Tahun 2022	Rp 43.507.239,00
Saldo Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2022	Rp 46.465.589,00
Saldo Piutang BLUD Puskesmas 31 Desember 2021	Rp 12.661.500,00
Penerimaan Piutang Tahun 2022	Rp (12.661.500,00)
Piutang Tahun 2022	Rp 55.891.600,00
Saldo Piutang BLUD Puskesmas per 31 Desember 2022	Rp 55.891.600,00
Jumlah	Rp 102.357.189,00

Rincian Piutang BLUD masing-masing Puskesmas dan RSUD sebagai berikut :

1	Puskesmas Anduring	0,00
2	Puskesmas Batu Basa	3.345.100,00
3	Puskesmas Gasan Gadang	6.394.200,00
4	Puskesmas Ketaping	0,00
5	Puskesmas Kampung Dalam	0,00
6	Puskesmas Kampung Guci	0,00
7	Puskesmas Koto Bangko	0,00
8	Puskesmas Kayu Tanam	0,00
9	Puskesmas Limau Purut	0,00
10	Puskesmas Lubuk Alung	0,00
11	Puskesmas Padang Alai	0,00
12	Puskesmas Padang Sago	697.100,00
13	Puskesmas Enam Lingsung	0,00
14	Puskesmas Pasar Usang	0,00
15	Puskesmas Patamuan	0,00
16	Puskesmas Sungai Geringging	8.884.200,00
17	Puskesmas Sungai Limau	0,00
18	Puskesmas Sungai Sarik	6.305.200,00
19	Puskesmas Sicincin	5.679.200,00
20	Puskesmas Sikabu	931.100,00
21	Puskesmas Sintuk	697.100,00
22	Puskesmas Ulakan	2.197.100,00
23	Puskesmas Pauh Kamar	17.964.200,00
24	Puskesmas Ampalu	0,00
25	Puskesmas Sikucur	2.797.100,00
26	RSUD	46.465.589,00
	Jumlah	102.357.189,00

Piutang Dana Bos berasal dari piutang Dana Bos yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp12.290.9140,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo atas Piutang Dana Bos per 31 Desember 2021	Rp	32.967.218,00
Setoran dari Badan Keuangan Daerah Prov. Sumbar (koreksi tahun 2022)	Rp	(22.761.451,00)
Bunga Dana Bos Tahun 2022	Rp	28.016.389,00
Penerimaan Bunga Bos di Kas Daerah Tahun 2022	Rp	(28.016.389,00)
Saldo Piutang Bunga Bos per 31 Desember 2022	Rp	10.205.767,00

Saldo Piutang Dana Bos sebesar Rp10.205.767,00 merupakan pendapatan bunga dana bos dari tahun 2018 sampai dengan 2022 yang belum disetorkan ke kas daerah dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Bunga Dana Bos tahun 2018	Rp	6.725.500,00
Piutang Bunga Dana Bos tahun 2019	Rp	2.121.323,00
Piutang Bunga Dana Bos tahun 2020	Rp	783.159,00
Piutang Bunga Dana Bos tahun 2021	Rp	575.785,00
Piutang Bunga Dana Bos tahun 2022	Rp	0,00
Saldo Piutang Bunga Bos per 31 Desember 2022	Rp	10.205.767,00

8. Piutang Transfer Antar Daerah.

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
11.461.697.483,00	13.924.160.921,00

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp11.461.697.483,00 dan Rp13.924.160.921,00 Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2022 merupakan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5. 36. Piutang Transfer Antar daerah

No.	Jenis DBH Provinsi	Kurang Salur per 31 Des 2022 (Rp)
1	PKB	3.099.814.599,00
2	BBNKB	1.421.093.817,00
3	PBBKB	6.930.726.309,00
4	PAP	10.062.758,00
Jumlah		11.461.697.483,00

Keputusan atas Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/06/Pjk-Bapenda/2023 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

9. Piutang Lainnya.

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
11.140.305,00	9.834.305,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp11.140.305,00 dan Rp9.834.305,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklas atas kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 ke Kas Negara di Tahun 2011 sebesar Rp3.040.305,00 ke Piutang Lainnya.
2. Reklas Tagihan Ganti Rugi sebesar Rp8.100.000,00 ke Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Rincian Tagihan Ganti Rugi sebagai berikut :

Tahun 2019 :

1. Piutang TGR ke Darfa Yenil sebesar Rp2.900.000,00.
2. Piutang TGR ke Nailus sebesar Rp250.000,00.

Tahun 2021 :

Piutang TGR ke By.Kenek sebesar Rp350.000,00.

Tahun 2022:

Qorri Suti Armi,A.Md.Keb sebesar Rp4.600.000,00.

10. Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
(33.464.276.708,82)	(30.233.396.012,55)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp(33.464.276.708,82) dan Rp(30.233.396.012,55) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 37. Penyisihan Piutang

NO	Uraian	Jumlah
1.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	56.255.525,00
2.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	4.327.059,27
3.	Penyisihan Piutang PBB P2	32.822.416.908,68
4.	Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	506.185.733,50
5.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	13.080189,95
6..	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	57.308.487,42
7.	Penyisihan Piutang Lainnya	4.702.805,00
Jumlah		33.464.276.708,82

11. Persediaan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
13.589.991.987,94	14.701.697.321,29

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp13.589.991.987,94 dan Rp14.701.697.321,29 Persediaan per 31 Desember 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 38. Persediaan

No	Uraian	JUMLAH UN AUDITED
1.	Persediaan Bahan	2.751.931.125,39
2.	alat/bahan untuk kegiatan kantor	920.581.717,00
3.	obat-obatan	9.910.801.145,55
4.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	4.500.000,00
5.	Natura dan Pakan	2.178.000,00
Jumlah		13.589.991.987,94

Rincian Persediaan Per SKPD dapat dilihat pada lampiran 5.

Selain persediaan yang tercatat di atas, juga terdapat obat kadaluarsa di Dinas Kesehatan sebesar Rp132.624.451,09 dan di RSUD sebesar Rp878.404.409,21, disamping itu pada RSUD juga terdapat Bahan Habis Pakai (Bahan Kimia) yang telah kadaluarsa sebesar Rp377.211.669,49.

B. INVESTASI JANGKA PANJANG.

Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

94.766.691.331,09

95.476.720.979,74

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dilaksanakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp94.766.691.331,09 dan Rp95.476.720.979,74 berupa Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 39. Investasi Jangka Panjang

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)	4.232.465.232,00
2	Penyisihan Investasi Non Permanen	(4.232.465.232,00)
3	Investasi Permanen	94.766.691.331,09
Jumlah		94.766.691.331,09

Investasi jangka Panjang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Investasi Non Permanen (Dana Bergulir).

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
4.232.465.232,00	4.236.965.232,00

Saldo per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp4.232.465.232,00 dan Rp4.236.965.232,00.

2. Penyisihan Investasi Non Permanen.

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
(4.232.465.232,00)	(4.236.965.232,00)

Jumlah tersebut merupakan Penyisihan Investasi Non Permanen yang kemungkinan tidak tertagih yang diperoleh melalui *aging schedule*. Sampai dengan 31 Desember 2015 Penyisihan Piutang Non Permanen telah mencapai nilai maksimal dari nilai Investasi Non Permanen.

Rincian Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) dapat dilihat pada Lampiran 6.

3. Investasi Permanen.

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
94.766.691.331,09	95.476.720.979,74

Investasi Permanen merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah. Saldo per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp94.766.691.331,09 dan Rp95.476.720.979,74.

Rincian Penyertaan modal tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 40. Penyertaan Modal Daerah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Bank Nagari Sumatera Barat	Rp42.941.000.000,00
	Per 31 Desember 2020 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Bank Nagari Sumatera Barat Rp42.941.000.000,00. Dari jumlah penyertaan modal sebesar Rp42.941.000.000,00 telah dikonversikan menjadi lembar saham dengan jumlah lembar sebanyak 42.941 lembar. Persentase penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman per 31 Desember 2022 sebesar 2.37%.	

2.	PDAM Kabupaten Padang Pariaman	Rp41.633.561.697,37	
<p>Per 31 Desember 2022 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada PDAM Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp41.633.562.697.37 dengan persentase sebesar 85,26%.</p> <p>Sesuai dengan kebijakan akuntansi, untuk penyertaan modal yang kepemilikannya 20% atau lebih maka penilaian investasi dilakukan dengan metode ekuitas. Berdasarkan persentase penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada PDAM Kabupaten Padang Pariaman sebesar 85,26%, maka penilaian investasi pada PDAM Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dengan metode ekuitas.</p> <p>Pada Tahun 2022 ini dilakukan penilaian kembali atas investasi pada PDAM Kabupaten Padang Pariaman dengan metode ekuitas, sehingga investasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.</p> <p>Rincian perhitungan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman ke PDAM Kabupaten Padang Pariaman dengan metode ekuitas, sebagai berikut:</p>			
No.	Uraian	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
Tahap I (2017)			
a.	Kekayaan Pemkab yang dipisahkan (berdasarkan LK PDAM)	74.524.995.187,00	
b.	Kerugian yang ditanggung Pemkab	(64.135.210.546,36 x 83,99%)	53.867.163.337,89
c.	Jumlah kekayaan Pemkab setelah perhitungan kerugian (a-b)	20.657.831.849,11	
Tahap II (2018)			
a.	Jumlah kekayaan Pemkab yang di pisahkan setelah perhitungan kerugian Tahun 2017	20.657.831.849,11	
b.	Penyertaan Modal Tahun 2018 yang berasal dari Hibah Pemerintah Pusat	7.638.000.000,00	
c.	Nilai kekayaan Pemkab yang dipisahkan Tahun 2018 (setelah penambahan modal) (a+b)	28.295.831.849,11	
d.	Kerugian Tahun 2018 yang ditanggung Pemkab	(349.058.369,78x 85,26%)	297.607.166,07
e.	Jumlah Kekayaan Pemkab setelah Perhitungan Kerugian (c-d)	27.998.224.683,04	
Tahap III (2019)			
a.	Jumlah Kekayaan Pemkab setelah perhitungan kerugian tahun 2018	27.998.224.683,04	
b.	Penyertaan Modal Tahun 2019 yang berasal dari Hibah Pemerintah Pusat	8.160.000.000,00	
c.	Nilai kekayaan Pemkab yang dipisahkan Tahun 2019 (setelah penambahan modal) (a+b)	36.158.224.683,04	

d.	Keuntungan Tahun 2019 yang ditanggung Pemkab	(952.254.970,00 x 85,26%)	811.892.587,42
e.	Jumlah Kekayaan Pemkab setelah Perhitungan Keuntungan (c-d)		36.970.117.270,46
Tahap IV (2020)			
a.	Jumlah Kekayaan Pemkab setelah perhitungan kerugian tahun 2019		36.970.117.270,46
b.	Penyertaan Modal Tahun 2020 yang berasal dari Hibah Pemerintah Pusat		0,00
c.	Nilai kekayaan Pemkab yang dipisahkan Tahun 2019 (setelah penambahan modal) (a+b)		36.970.117.270,46
d.	Keuntungan Tahun 2019 yang ditanggung Pemkab	(731.996.270,00 x 85,26%)	624.100.019,80
e.	Jumlah Kekayaan Pemkab setelah Perhitungan Keuntungan (c+d)		37.594.217.290,26
Tahap V (2021)			
a.	Jumlah Kekayaan Pemkab setelah perhitungan kerugian tahun 2019		37.594.217.290,26
b.	Penyertaan Modal Tahun 2000 yang berasal dari Hibah Pemerintah Pusat		7.461.000.000,00
c.	Nilai kekayaan Pemkab yang dipisahkan Tahun 2019 (setelah penambahan modal) (a+b)		45.055.217.290,26
d.	Kerugian yang ditanggung Pemkab Tahun 2021	(3.042.820.579,17 x 85,26%)	(2.594.308.825,80)
e.	Jumlah Kekayaan Pemkab setelah Perhitungan Keuntungan (c-d)		42.460.908.464,46
Tahap VI (2022)			
a.	Jumlah Kekayaan Pemkab setelah perhitungan kerugian tahun 2021		42.460.908.464,46
b.	Penyertaan Modal Tahun 2022 yang berasal dari Hibah Pemerintah Pusat		1.299.000.000,00
c.	Nilai kekayaan Pemkab yang dipisahkan Tahun 2022 (setelah penambahan modal) (a+b)		43.759.908.464,46
d.	Kerugian Tahun 2022 yang ditanggung Pemkab	(2.493.955.861 x 85,26%)	(2.126.346.767,09)
e.	Jumlah Kekayaan Pemkab setelah Perhitungan Keuntungan (c-d)		41.633.561.697,37
3.	PT. BPR-PKPP		7.267.230.633,72
	Per 31 Desember 2022 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada PT. BPR-PKPP sebesar Rp7.267.230.633,72 dengan persentase sebesar 99,68%.		

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, untuk penyertaan modal yang kepemilikannya 20% atau lebih maka penilaian investasi dilakukan dengan metode ekuitas. Berdasarkan persentase penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada PT. BPR-PKPP sebesar 99,68%, maka penilaian investasi pada PT. BPR-PKPP dilakukan dengan metode ekuitas.

Pada Tahun 2022 ini dilakukan penilaian kembali atas investasi pada PT. BPR-PKPP dengan metode ekuitas, sehingga investasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Rincian perhitungan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman ke PT. BPR-PKPP dengan metode ekuitas, sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
Tahap I (2017)			
a.	Modal disetor Pemkab per 01 Januari Tahun 2017		4,500,000,000.00
b.	Deviden atas Laba yang akan diterima terdiri dari :		
	- Deviden Tahun 2015		58.735.476,00
	- Deviden Tahun 2016		92.922.735,00
c.	Penambahan saldo laba Tahun 2017 untuk cadangan umum terdiri dari :		
	- Tahun 2015	36.000.904,x 99,68%	35.885.701,11
	- Tahun 2016	56.176.024,x 99,68%	55.996.260,72
d.	Laba tahun berjalan (2017) yang belum dibagi	193.314.763 x99,52%	192.386.852,14
	Jumlah (a+b+c+d)		4.935.927.024,97
e.	Penerimaan Penyetoran Deviden Tunai di Kas daerah yang merupakan Deviden Tahun 2015		58.735.476,00
	Jumlah Investasi Pemkab per 31 Desember 2017		4.877.191.548,97
Tahap II (2018)			
a.	Modal disetor Pemkab per 01 Januari Tahun 2018		4.877.191.548,97
b.	Deviden atas Laba yang akan diterima Tahun 2018		96.165.140,00
c.	Penambahan saldo laba untuk cadangan umum Tahun 2017	57.994.428,00 x 99,68%	57.808.845,83
d.	Setoran Modal Tahun 2018		1.500.000.000,00
e.	Laba tahun berjalan (2018) yang belum dibagi	213.984.905,00 x 99,64%	213.214.559,34
f.	Laba Tahun 2017 yang telah dibagikan		(192.386.852,14)
	Jumlah (a+b+c+d)		6.551.993.242,00
g.	Penerimaan Penyetoran Deviden Tunai di Kas daerah yang terdiri dari :		
	- Deviden Tahun 2016		(92.922.735,00)
	- Deviden Tahun 2017		(96.165.140,00)

Jumlah Investasi Pemkab per 31 Desember 2018		6.362.905.367,00
Tahap III (2019)		
a.	Modal disetor Pemkab per 01 Januari Tahun 2019	6.362.905.367,00
b.	Deviden atas Laba yang akan diterima Tahun 2019	149.195.461,00
c.	Penambahan saldo laba untuk cadangan umum Tahun 2019	64.195.461,00 x 99,68% 63.990.047,49
d.	Laba tahun berjalan (2019) yang belum dibagi	233.933.943,00x99,64% 233.091.780,81
d.	Laba Tahun 2018 yang telah dibagikan	(213.214.559,34)
Jumlah (a+b+c+d)		6.595.968.096,96
f.	Penerimaan Penyetoran Deviden Tunai di Kas daerah atas Deviden Tahun 2018	(149.195.461,00)
Jumlah Investasi Pemkab per 31 Desember 2019		6.446.772.635,96
Tahap IV (2020)		
a.	Modal disetor Pemkab per 01 Januari Tahun 2020	6.446.772.635,96
b.	Deviden atas Laba yang akan diterima Tahun 2020	163.169.071,00
c.	Penambahan saldo laba untuk cadangan umum Tahun 2020	70.180.182,00 x 99,68% 69.955.605,89
d.	Setoran Modal Tahun 2020	750.000.000,00
e.	Laba tahun berjalan (2020) yang belum dibagi	65.811.910,00 x 99,68% 65.601.311,89
f.	Laba Tahun 2019 yang telah dibagikan	(233.091.781,00)
Jumlah (a+b+c+d)		7.262.406.843,74
g.	Penerimaan Penyetoran Deviden Tunai di Kas daerah atas Deviden Tahun 2019	(163.169.071,00)
Jumlah Investasi Pemkab per 31 Desember 2020		7.099.237.772,74
Tahap IV (2021)		
a.	Modal disetor Pemkab per 01 Januari Tahun 2021	7.099.237.772,74
b.	Deviden atas Laba yang akan diterima Tahun 2021	45.915.994,00
c.	Penambahan saldo laba untuk cadangan umum Tahun 2021	19.728.572,00 x 99,68% 19.665.440,08
d.	Setoran Modal tahun 2021	-
e.	Laba tahun berjalan (2021) yang belum dibagi	96.921.764,00x 99,68% 96.611.614,35
f.	Laba Tahun 2020 yang telah dibagikan	(65.601.311,89)
Jumlah (a+b+c+d)		7.195.829.509,28
Penerimaan Penyetoran Deviden Tunai di Kas daerah atas Deviden Tahun 2020		(45.915.994,00)

	Jumlah Investasi Pemkab per 31 Desember 2020	7.149.913.515,28
	Tahap IV (2022)	
a.	Modal di setor Pemkab per 01 Januari Tahun 2022	7.149.913.515,28
b.	Deviden atas Laba tahun 2021 yang akan diterima Tahun 2022	48.307.000,00
c.	Penambahan saldo laba untuk cadangan umum Tahun 2022	49.526.654,40x 99,68% 49.368.169,11
d.	Setoran Modal Tahun 2022	0,00
e.	Laba tahun berjalan (2022) yang belum dibagi	165.088.848,00x99,68% 164.560.563,69
F	Laba Tahun 2021 yang telah dibagikan	(96.611.614,35)
	Jumlah (a+b+c+d)	7.315.537.633,72
g.	Penerimaan Penyetoran Deviden Tunai di Kas daerah atas Deviden Tahun 2021	(48.307.000,00)
	Jumlah Investasi Pemkab per 31 Desember 2022	7.267.230.633,72
4.	KUD Dwi Sri	100.000.000,00
	<p>Penyertaan modal pada KUD Dwi Sri dengan nilai perolehan (<i>cost method</i>) sebesar Rp100.000.000,00.</p> <p>KUD Dwi Sri sejak beberapa tahun belakang tidak lagi melakukan aktivitas dan secara manajemen tidak ada lagi penanggung jawabnya. Sehingga sampai dengan penyusunan laporan keuangan Tahun 2020 laporan keuangan KUD Dwi Sri tidak diperoleh.</p>	
5.	Perusahaan Daerah Saiyo	0,00
	<p>Nilai perolehan (<i>cost method</i>) investasi permanen pada Perusda Saiyo sebesar Rp0,00. Perusda ini tidak beroperasi lagi.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Saiyo Sakato Padang Pariaman, Perusahaan Daerah Saiyo Sakato telah resmi dibubarkan sejak tanggal 3 Mei 2016.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, sambil menunggu langkah selanjutnya. Pencatatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke Perusda Saiyo Sakato di reklas ke Aset Lain-lain.</p>	
6.	PT.Balairung Citra Jaya Sumbar	2.824.899.000,00
	<p>Penyertaan modal pada Tahun 2012 pada PT Balairung Citra Jaya Sumbar dalam bentuk Saham Gabungan yang merupakan Saham atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 1.131.655 lembar dengan rincian saham seri A sebanyak 1.694 lembar dan saham seri B sebanyak 1.130.960 lembar. Persentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebesar 1.72%.</p>	
	Jumlah	94.766.691.331,09

1. Tanah.

	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	210.556.816.749,00	211.384.066.749,00
Nilai tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp210.556.816.749,00 terdiri atas:		
Saldo Awal		Rp 211.384.066.749,00
▪ Hibah dari Pihak Ketiga (+)		Rp 10.000.000,00
▪ Hibah ke Pihak Ketiga (-)		Rp (787.480.000,00)
▪ Penghapusan (-)		Rp (49.770.000,00)
Saldo akhir		Rp 210.556.816.749,00

Penambahan Aset Tanah merupakan pembelian tanah seluas 144m² dari dana Komite pada SDN 08 Lubuk Alung sebesar Rp10.000.000,00.

Pengurangan Aset Tanah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Hibah ke pihak ketiga sebesar Rp787.480.000,00 merupakan:
- Penyerahan ke Kota Pariaman sebesar Rp687.480.000,00 sesuai BAST Nomor : 900/68/BAST/BPKD/2022 tanggal 25 Mei 2022, pada Sekretariat Daerah dengan rincian:
 - Tanah Bangunan Pasar (Pariaman Plaza) Rp684.000.000,00
 - Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II Rp 3.480.000,00
 - Tanah Lapangan Taman Lainnya Tahun 2011 senilai Rp100.000.000,00 dengan luas 10.000 m² untuk pembangunan kantor Sat Pol Air Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Padang Pariaman, dimana hibah sudah dilakukan pada tahun 2013 dan sesuai Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 36/KEP/BPP/2013 tanggal 15 Februari 2013 seharusnya tanah tersebut sudah dihapuskan dari Neraca Kabupaten Padang Pariaman, namun penghapusan dari Neraca Kabupaten Padang Pariaman terlaksana pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan tersebut diatas.
- b) Penghapusan sebesar Rp49.770.000,00 merupakan Penghapusan akibat Proyek Strategis Nasional (Pembangunan Jalan Tol) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Batang Anai) sesuai Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 461/KEP/BPP/2022 tanggal 8 November 2022. Tanah yang terdampak pembangunan jalan tol akan direlokasi ke tanah pengganti seluas ± 12.000m² dimana proses penggantian tanah sudah

tahap perbaikan peta bidang oleh Badan Pertanahan dan sudah proses pembayaran oleh LMAN.

Kemudian nilai tanah tahun 2022 sebesar Rp210.556.816.749,00 secara luas adalah sebanyak 1.459 persil tanah yang terdiri dari 362 persil tanah telah bersertifikat, sedangkan sisanya 1.097 persil tanah belum bersertifikat yang diantaranya termasuk tanah jalan sebanyak 741 persil tanah. Pada tahun 2022 Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil mensertifikatkan 21 persil tanah.

Diantara 1.097 persil tanah yang belum bersertifikat tersebut di atas terdapat tanah Taman Kehati seluas 10.000m² yang tergabung dalam tanah IKK dan tanah SDN 06 Batang Anai seluas 1.000 m², saat ini kedua bidang tanah tersebut sedang dalam proses hukum yang dapat berdampak terhadap status kepemilikan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman apabila keluar keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Selanjutnya ada 4 persil tanah yang bahagiannya disewakan kepada Pihak Ketiga yaitu :

- Rumah Sakit Umum Daerah (Tanah Bangunan Rumah Sakit) disewakan ke PT. Bank Nagari Cabang Lubuk Alung seluas 12m² (3m x 4m) untuk bangunan ruang ATM selama 5 (lima) tahun terhitung 12 April 2022 sampai dengan 11 April 2027 berdasarkan Kontrak Nomor : 900/09/BPKD-Aset/2022 senilai Rp37.500.000,00 dan atas nilai kontrak tersebut telah diterima pembayaran sebesar Rp37.500.000,00 pada tanggal 16 September 2022.
- Sekretariat Daerah (Tanah Bangunan Gedung Kantor) di sewakan ke PT. Bank Nagari Cabang Lubuk Alung seluas 32m² (4m x 8m) untuk ruang Kantor Kas dan 10,5m² (3m x 3,5m) untuk ruang ATM selama 5 (lima) tahun terhitung 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024 berdasarkan Kontrak Nomor : 030/101/BPKD-Aset/2020 senilai Rp26.000.000,00 dan atas nilai kontrak tersebut telah diterima pembayaran sebesar Rp26.000.000,00 pada tanggal 18 Mei 2020.
- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Tanah Bangunan Industri Lainnya) disewakan ke PT. Andalas Anaipermai International seluas 92.270m² untuk lahan parkir serta fasilitas pendukung lainnya selama 20 (dua puluh) tahun terhitung 1 November 2021 sampai dengan 31 Oktober 2041 berdasarkan Kontrak Nomor : 030/699/BPKD/XI-2021 senilai

Rp1.500.000.000,00 dan atas nilai kontrak tersebut telah diterima pembayaran sebesar Rp1.500.000.000,00 pada tanggal 5 November 2021.

- Sekretariat Daerah (Tanah Bangunan Gedung Kantor) ke PT. Dayamitra Telekomunikasi seluas 225m² (25m x 25m) untuk penempatan bangunan Menara Telekomunikasi dan 15m² (5m x 3m) untuk akses jalan selama 5 (lima) tahun terhitung 3 Juni 2019 sampai dengan 2 Juni 2024 berdasarkan Kontrak Nomor : 900/515/BPKD-Aset/2019 senilai Rp77.777.777,00 (termasuk pph) dan atas nilai kontrak tersebut telah diterima pembayaran sebesar Rp69.999.999,00 pada tanggal 10 Februari 2020.

Rincian lebih lanjut tentang aset Tanah dapat di lihat pada lampiran 8.

2. Peralatan dan Mesin.

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
466.957.311.323,41	432.763.508.496,54

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp466.957.311.323,41 terdiri:

Saldo Awal	Rp 432.763.508.496,54
• Belanja Modal 2022 (+)	Rp 30.445.954.899,00
• Hibah dari pihak ketiga (+)	Rp 12.648.579.697,00
• Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin (+)	Rp 1.220.796.500,00
• Lebih Catat (-)	Rp (43.892.400,00)
• Penghapusan (-)	Rp (5.533.327.803,37)
• Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin (-)	Rp (4.544.308.065,76)
Saldo akhir	Rp 466.957.311.323,41

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp30.445.954.899,00 adalah berdasarkan LRA Tahun 2022.
- b. Hibah dari Pihak Ketiga sebesar Rp12.648.579.697,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Hibah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah berupa Peralatan TIK SMP. Rp 272.677.500,00
 - Hibah dari Komite kepada sekolah-sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rp 84.157.000,00

- Hibah Alat-alat Kesehatan (pengadaan tahun 2014) sebanyak 119 unit dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ke RSUD Padang Pariaman BASTB Nomor : KN02.07/I.3/12601/2022 dan dicatatkan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB B) sesuai BASTB Hibah. Rp 9.230.957.506,00
 - Hibah Mobiler Rusunawa (pengadaan tahun 2016) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Dinas Lingkungan Hidup PKPP (Nilai Hibah sesuai BASTB Nomor : 68/BA/Sj/2022 Rp1.359.774.400,00, setelah dilakukan pengecekan ulang terdapat beberapa barang yang tidak ditemukan sehingga ada perbedaan nilai sebesar Rp43.857.788,00 antara BAST Hibah dengan Rekap Barang ke Neraca). Rp 1.315.916.612,00
 - Hibah mobil Pemadam Kebakaran Tahun 2005 dari Propinsi DKI Jakarta senilai Rp1.572.900.000,00 ke Dinas Satpol PP dan Damkar (BAST Nomor 15 tahun 2022). Rp 1.572.900.000,00
 - Hibah Pojok Baca Digital dari Pustaka Nasional RI ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Rp 171.971.079,00
- c. Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.220.796.500,00 terdiri dari:
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan kegiatan Pembangunan Sentra IKM DAK 2022 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian berupa Mesin Pengolahan. Rp 1.163.601.900,00
 - Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi berupa Pembelian Genset pada Dinas Kesehatan. Rp 7.315.000,00

- Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp24.072.100,00 adalah:
 - Inspektorat Daerah pembelian *Mic Wireless*. Rp 1.750.000,00
 - RSUD pembelian *soundsystem* dan *Amplifier*. Rp 22.322.100,00
- Reklasifikasi dari Aset Lain-lain (Rusak Berat dan Aset Dalam Penelusuran):
 - Sepeda Motor Tahun 1994 BA 7543 F di Kecamatan Sungai Geringging. Rp 3.700.000,00
 - Kecamatan Ulakan Tapakis. Rp 22.107.500,00

Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Lebih catat sebesar Rp43.892.400,00 adalah koreksi pencatatan gelondongan sebelum tahun 2022 yang direklas ke ekstra komptabel pada:
 - Kecamatan Padang Sago Rp 5.272.000,00
 - Kecamatan Patamuan RP 4.800.000,00
 - Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Rp 765.800,00
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 18.633.600,00
 - Dinas Perikanan Rp 14.421.000,00
- b. Penghapusan senilai Rp5.533.327.803,37 merupakan penghapusan aset Peralatan dan Mesin sesuai Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 460, 498, 499 dan 500/KEP/BPP/2022 dengan rincian :
 - Sekretariat Daerah Rp 907.179.933,33
 - Sekretariat DPRD RP 211.583.950,00
 - Badan Pengelola Keuangan Daerah Rp 227.168.486,00
 - Inspektorat Daerah Rp 7.600.000,00
 - Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Rp 3.000.000,00
 - Kecamatan Lubuk Alung Rp 21.050.000,00
 - Kecamatan IV Koto Aur Malintang Rp 4.400.000,00
 - Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Rp 1.500.000,00
 - Kecamatan Batang Anai Rp 7.827.272,00
 - Kecamatan V Koto Timur Rp 7.000.000,00
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 712.615.639,32
 - Dinas Kesehatan Rp 653.747.511,00
 - Rumah Sakit Umum Daerah Rp 472.650.525,72
 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Rp 115.000.000,00

- Dinas Perhubungan Rp 32.152.000,00
 - Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp 224.265.900,00
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp 272.770.053,00
 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp 973.024.450,00
 - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Rp 11.000.000,00
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp 622.668.583,00
 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Rp 750.000,00
 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp 28.000.000,00
 - Dinas Perikanan Rp 16.373.500,00
- c. Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.544.308.065,76 terdiri dari:
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp222.820.900,00 berupa:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (dana BOS). Rp 183.970.900,00
 - Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Bangunan Pengaman Alat Laboratorium) Rp 38.850.000,00
 - Reklasifikasi ke JJI sebesar Rp35.830.000,00 berupa:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Belanja BOS). Rp 4.750.000,00
 - Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Jaringan Listrik untuk Bangunan Alat Laboratorium), Rp 31.080.000,00
 - Reklasifikasi ke Aset Lain Lain Rusak Berat sebesar Rp1.073.963.107,76 merupakan alat-alat kedokteran dan kesehatan pada RSUD Padang Pariaman.
 - Reklasifikasi ke Ekstrakompatabel sebesar Rp1.310.968.193,00 sebagai berikut:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 1.242.638.010,00
 - Dinas Kesehatan Rp 4.431.200,00
 - RSUD Rp 40.417.883,00

- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp 2.830.000,00
- Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Rp 688.000,00
- Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian Rp 14.025.000,00
- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Rp 5.938.100,00
- Reklasifikasi ke Utang Jangka Pendek sebesar Rp1.815.562.000,00 adalah sisa pembayaran pembelian Alat TIK SMP (DAK 2021) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Reklasifikasi ke Barang dan Jasa sebesar Rp85.163.865,00 dengan rincian:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 81.432.600,00
 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Rp 3.731.265,00

Rincian lebih lanjut dapat di lihat pada lampiran 9.

3. Gedung dan Bangunan.

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.062.489.762.711,23	988.204.631.259,23

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.062.489.762.711,23 Dari jumlah ini tidak termasuk nilai gedung yang belum selesai dikerjakan Tahun 2022. Rincian Gedung dan bangunan sebagai berikut:

• Saldo Awal	Rp	988.204.631.259,23
• Belanja Modal 2022 (+)	Rp	34.708.818.439,00
• Koreksi Penghapusan (+)	Rp	43.492.800,00
• Hibah dari Pihak Ketiga (+)	Rp	24.488.626.074,00
• Utang Jangka Pendek (+)	Rp	1.272.621.270,00
• Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan (+)	Rp	28.760.114.276,00
• Penghapusan (-)	Rp	(611.498.454,00)
• Hibah Ke Pihak Ketiga (-)	Rp	(7.428.725.000,00)
• Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan (-)	Rp	(6.948.317.953,00)
Saldo akhir	Rp	1.062.489.762.711,23

Penambahan Aset Gedung dan Bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp34.708.818.439,00 adalah berdasarkan LRA Tahun 2022.
- b. Koreksi Penghapusan sebesar Rp43.492.800,00 merupakan penghapusan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 terhadap bangunan rumah dinas di SDN 31 VII Koto Sungai Sariak.

- c. Hibah dari Pihak Ketiga sebesar Rp24.488.626.074,00 berupa :
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Hibah dari Rp 342.891.000,00 Komite).
 - Dinas Kesehatan (Hibah Bangunan Puskesmas Kampung Guci Tahun 2015 dari Kementerian Kesehatan RI dengan BASTB Nomor :KN.02.07/I.3/16658/2021).
 - Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Hibah dari Rp 21.410.565.678,00 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BASTB Nomor : 68/BA/SJ/2022).
- d. Utang Jangka Pendek sebesar Rp1.272.621.270,00 merupakan penyelesaian pekerjaan bangunan Sentra IKM tahun 2022 yang belum dibayarkan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian.
- e. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp222.820.900,00 berupa:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Belanja BOS). Rp 183.970.900,00
 - Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Bangunan Pengaman Alat Laboratorium). Rp 38.850.000,00
- f. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp28.216.010.006,00 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian berupa bangunan sentra IKM tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.
- g. Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat sebesar Rp277.720.000,00 merupakan bangunan sekolah SMPN 2 Sungai Limau yang tercatat sebagai aset rusak berat, sesuai Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah kondisi bangunan sekolah tersebut masih kondisi baik.
- h. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp43.563.370,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah realisasi belanja pemeliharaan untuk pembuatan *front office*.

Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hibah ke Pihak Ketiga sebesar Rp7.428.725.000,00 merupakan penyerahan ke Kota Pariaman berupa:

- Inspektorat Daerah (Bangunan Rumah Negara Gol II) Rp 44.650.000,00
 - Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM (Bangunan Pariaman Plaza) Rp 7.384.075.000,00
- b. Penghapusan senilai Rp611.498.454,00 merupakan penghapusan Gedung dan Bangunan sesuai dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 461 dan 521 /KEP/BPP/2022 dengan rincian sebagai berikut:
- Dinas Kesehatan Rp 537.663.600,00
 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Rp 15.515.360,00
 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp 58.319.494,00
- c. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp6.948.317.953,00 dapat dirinci sebagai berikut:
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.163.601.900,00 merupakan pembelian mesin pengolahan untuk Sentra IKM yang direalisasikan pada rekening belanja modal Gedung dan Bangunan (DAK 2022) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian.
 - Reklasifikasi ke Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp2.048.091.700,00 dengan rincian:
 - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (Jaringan Listrik) Rp 1.728.930.200,00
 - Dinas Perikanan (Jaringan Air Bersih) Rp 319.161.500,00
 - Reklasifikasi ke Utang Jangka Pendek sebesar Rp3.736.624.353,00 dengan rincian:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 1.054.815.111,00
 - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Rp 2.681.809.242,00

Disamping itu masih terdapat 26 unit gedung dan bangunan yang didanai oleh *District Health System* versi 2 (DHS2) dan telah dimanfaatkan tetapi belum dicatat karena belum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun rincian unit gedung dan bangunannya tersebut adalah:

Tabel 5. 42. Rincian Unit Gedung dan Bangunan

No	Nama Fasilitas Kesehatan	Alamat
1	Kantor Dinas Kesehatan	Kecamatan Enam Lingkung
2	Puskesmas Sintuk	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang
3	Puskesmas Pembantu Pasar Sintuk	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang
4	Puskesmas Pembantu Batu Mangaum	Kecamatan Sungai Geringging
5	Puskesmas Pembantu Kampung Dadok	Kecamatan Sungai Geringging
6	Puskesmas Pembantu Malai Tengah	Kecamatan Batang Gasan
7	Puskesmas Pembantu Barang-barangan	Kecamatan Batang Gasan
8	Puskesmas Pembantu Sungai Pingai	Kecamatan IV Koto Aur Malintang
9	Puskesmas Pembantu Koto Dalam	Kecamatan Padang Sago
10	Puskesmas Pembantu Bukit Gonggang	Kecamatan V Koto Kampung Dalam
11	Puskesmas Pembantu Labu Kumbang	Kecamatan Patamuhan
12	Puskesmas Pembantu Durian Dangka	Kecamatan V Koto Kampung Dalam
13	Polindes Du (Kp.Ladang Limau Purut)	Kecamatan V Koto Timur
14	Polindes Kampung Tengah	Kecamatan Padang Alai
15	Polindes Sunur Tengah	Kecamatan Nan Sabaris
16	Polindes Kampung Kandang	Kecamatan Nan Sabaris
17	Polindes Padang Karambia	Kecamatan Sungai Limau
18	Polindes Lambéh	Kecamatan Sungai Geringging
19	Polindes Satu (Talau Atas Limau Purut)	Kecamatan V Koto Timur
20	Polindes Padang Kunik	Kecamatan Batang Anai
21	Polindes Batang Piaman	Kecamatan V Koto Timur
22	Polindes Ulakan	Kecamatan Ulakan Tapakis
23	Polindes Kantarok	Kecamatan Batang Gasan
24	Polindes Tanjung Alai	Kecamatan Sungai Geringging
25	Polindes Lubuk Napa	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam
26	Polindes Malai	Kecamatan Sungai Geringging

Rincian lebih lanjut tentang aset Gedung dan bangunan dapat di lihat pada lampiran 10.

4. Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi.

Per 31 Desember 2022

(Rp)

2.520.040.258.080,24

Per 31 Desember 2021

(Rp)

2.445.603.605.757,24

Nilai Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.520.040.258.080,24 terdiri dari:

Saldo Awal	Rp	2.445.603.605.757,24
▪ Belanja Modal 2022 (+)	Rp	66.520.884.059,00
▪ Utang Jangka Pendek (+)	Rp	6.865.214.970,00

▪ Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi (+)	Rp 2.083.921.700,00
▪ Reklasifikasi dari Aset Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi (-)	(1.033.368.406,00)
Saldo akhir	Rp 2.520.040.258.080,24

Penambahan Aset Tetap Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp66.520.884.059,00 adalah berdasarkan LRA Tahun 2022.
- b. Utang Jangka Pendek sebesar Rp6.865.214.970,00 merupakan paket pekerjaan DAU HOTMIX tahun 2022 yang diselesaikan pada perpanjangan waktu (50 hari) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- c. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp2.083.921.700,00 adalah:
 - Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari:
 - Belanja BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Rp 4.750.000,00
 - Belanja Jaringan Listrik pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp 31.080.000,00
 - Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:
 - Pengadaan Jalan Komplek, Gardu Listrik Rp 1.728.930.200,00 serta Jaringan Listrik (Sentra IKM/DAK 2022) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian.
 - Belanja Jaringan Air Bersih pada Dinas Perikanan Rp 319.161.500,00

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi dari Aset Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.033.368.406,00 terdiri dari:
 - Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.315.000,00 adalah pembelian Genset pada Dinas Kesehatan.
 - Reklasifikasi ke Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp366.027.000,00 adalah belanja modal Jalan,

Jembatan, Jaringan dan Irigasi berupa operational pemeliharaan pengaman sungai dan batu bronjong.

- Pembayaran Utang Jangka Pendek atas Aset Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp660.026.406,00 adalah utang tahun 2021 terhadap pekerjaan Paket 1 DAU Hotmix (Rp804.076.753,00 dikurangi denda Rp144.050.347,00).

Rincian lebih lanjut tentang Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi dapat di lihat pada lampiran 11

5. Aset Tetap Lainnya.

	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	84.963.226.604,35	82.218.325.544,35

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp84.963.226.604,35 merupakan nilai buku perpustakaan, barang bercorak seni/budaya dan lainnya yang tidak bisa dikelompokkan kedalam empat jenis aset tetap di atas dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	82.218.325.544,35
▪ Belanja Modal 2022 (+)	Rp	3.411.907.103,00
▪ Hibah dari Pihak Ketiga (+)	Rp	78.618.800,00
▪ Penghapusan (-)	Rp	(690.862.110,00)
▪ Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya (-)	Rp	(54.762.733,00)
Saldo akhir	Rp	84.963.226.604,35

Penambahan aset tetap lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.411.907.103,00 adalah berdasarkan LRA Tahun 2022.
- b. Hibah dari pihak ketiga sebesar Rp78.618.800,00 terdiri dari :
 - Hibah dari Komite pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rp 20.880.000,00
 - Hibah Buku dari Perpustakaan Nasional (BAST Nomor : 9137/4.2/PLK.03.07/XI.2022) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Rp 57.738.800,00

Pengurangan Aset Tetap Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penghapusan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp690.862.110,00 berupa buku-buku sudah tidak terpakai pada Sekolah-sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai SK Nomor 500/KEP/BPP/2022.
- b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp54.762.733,00 yang terdiri dari:

- Reklasifikasi ke Peralatan Mesin senilai Rp24.072.100,00 pada:
 - Inspektorat Daerah Rp 1.750.000,00
 - RSUD Padang Pariaman Rp 22.322.100,00
- Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud pada Dinas Perhubungan (Pengadaan *Software*). Rp 27.750.000,00
- Reklasifikasi ke Barang dan Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika (pembayaran lisensi 1 tahun). Rp 2.940.633,00

Rincian lebih lanjut tentang aset Tetap lainnya dapat di lihat pada lampiran 12

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	71.948.132.558,00	99.865.010.064,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp71.948.132.558,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	99.865.010.064,00
▪ Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa (+)	Rp	299.132.500,00
▪ Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan (-)	Rp	(28.216.010.006,00)
Saldo akhir	Rp	71.948.132.558,00

Penambahan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari reklasifikasi dari Barang dan Jasa sebesar Rp299.132.500,00 merupakan perencanaan untuk pekerjaan Jalan dan Jembatan Tahun 2023 yang bersumber dari dana Hibah BNPB.

Pengurangan aset Kontruksi Dalam Pengerjaan merupakan reklasifikasi ke Aset Gedung Bangunan sebesar Rp28.216.010.006,00 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian berupa Bangunan Sentra IKM yang berada di Kec. 2x11 Kayu Tanam

Rincian lebih lanjut tentang Aset Konstruksi Dalam pengerjaan dapat di lihat pada lampiran 13

7. Akumulasi Penyusutan.

	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	(3.293.190.445.269,28)	(3.107.429.632.161,41)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp(3.293.190.445.269,28) merupakan :

Saldo Awal	Rp	(3.107.429.632.161,41)
a. Koreksi Tambah (+)	Rp	(1.168.711.252,00)
b. Koreksi Kurang (-)	Rp	13.702.972.847,13
c. Penyusutan 2022 (+)	Rp	(198.295.074.703,00)
Saldo akhir	Rp	(3.293.190.445.269,28)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp(3.293.190.445.269,28) dengan rincian sebagai :

Tabel 5. 43. Akumulasi Penyusutan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Peralatan dan Mesin	Rp 353.420.791.549,66
2.	Gedung dan Bangunan	Rp 483.982.035.079,38
3.	Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi	Rp 2.455.787.618.640,24
	Total	Rp 3.293.190.445.269,28

Nilai koreksi akumulasi penyusutan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.168.711.252,00 terdiri dari :

- Koreksi Kurang Saldo Awal sebesar Rp1.236.393,00 merupakan perhitungan kembali saldo awal Akumulasi Penyusutan sebagai akibat pembulatan nilai dan kurang catat :

- Sekretariat DPRD	Rp	1,00
- Kecamatan Sungai Geringging	Rp	3,00
- Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Rp	2,00
- Kecamatan V Koto Timur	Rp	3,00
- Kecamatan Patamuan	Rp	232.667,00
- Kecamatan Enam Lingkung	Rp	3,00
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	3,00
- Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	1.003.666,00
- Dinas Perhubungan	Rp	4,00
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	8,00
- Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Rp	1,00
- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Rp	1,00
- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Rp	1,00
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp	28,00
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp	1,00
- Dinas Perikanan	Rp	1,00

- Hibah dari Pihak Ketiga sebesar Rp831.947.359,00 pada Dinas Kesehatan.
 - Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat sebesar Rp335.527.500,00 merupakan reklasifikasi akumulasi penyusutan aset lain-lain pada:
 - Kecamatan Sungai Geringging Rp 3.700.000,00
 - Kecamatan Ulakan Tapakis Rp 22.107.500,00
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 277.720.000,00
 - Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Rp 32.000.000,00
- b. Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan sebesar Rp13.702.972.847,13 terdiri dari :
- Koreksi Lebih Saldo Awal sebesar Rp819.312.612,00 merupakan perhitungan kembali saldo awal Akumulasi Penyusutan sebagai akibat lebih catat dan pembulatan masing-masing :
 - Sekretariat Daerah Rp 470.391.623,00
 - Kecamatan Padang Sago Rp 5.272.000,00
 - Kecamatan Patamuan Rp 4.800.000,00
 - Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Rp 765,800,00
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 137.700.511,00
 - RSUD Padang Pariaman Rp 185.961.661,00
 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Rp 2,00
 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp 2,00
 - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Rp 13,00
 - Dinas Perikanan Rp 14.421.000,00
 - Hibah ke Pihak Ketiga sebesar Rp6.265.335.182,00 merupakan perhitungan akumulasi penyusutan sebagai akibat penyerahan gedung bangunan ke Kota Pariaman terdiri dari:
 - Inspektorat Daerah (Rumah Negara Gol II). Rp 29.208.542,00
 - Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM (Bangunan Pariaman Plaza). Rp 6.236.126.640,00
 - Penghapusan sebesar Rp5.903.427.208,37 merupakan perhitungan akumulasi penyusutan sebagai akibat penghapusan aset tetap peralatan mesin dan gedung bangunan masing-masing :
 - Sekretariat Daerah Rp 847.314.134,33
 - Sekretariat DPRD Rp 211.583.950,00
 - Badan Pengelola Keuangan Daerah Rp 224.241.653,00
 - Inspektorat Daerah Rp 7.600.000,00

Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	Rp	3.000.000,00
Kecamatan Lubuk Alung	Rp	20.670.000,00
Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Rp	4.400.000,00
Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	Rp	1.500.000,00
Kecamatan Batang Anai	Rp	7.044.544,00
Kecamatan V Koto Timur	Rp	7.000.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	703.557.241,32
Dinas Kesehatan	Rp	1.064.629.662,00
RSUD	Rp	449.340.525,72
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	115.000.000,00
Dinas Perhubungan	Rp	31.463.200,00
Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	223.036.483,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	266.419.386,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	972.884.450,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Rp	11.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	622.668.583,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp	16.265.360,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp	76.434.536,00
Dinas Perikanan	Rp	16.373.500,00

• Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp714.897.844,76 merupakan perhitungan akumulasi penyusutan sebagai akibat reklasifikasi ke Aset Lain-lain terdiri dari:

- Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	682.897.844,76
- Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Rp	32.000.000,00

Penyusutan Tahun 2022 sebesar Rp(198.295.074.703,00) terdiri dari:

a. Peralatan dan Mesin	Rp	(46.714.812.863,00)
b. Gedung dan Bangunan	Rp	(53.684.369.985,00)
c. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	(97.895.891.855,00)

Rincian lebih lanjut tentang Akumulasi Penyusutan dapat di lihat pada lampiran 14

D. ASET LAINNYA.

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
3.774.452.669,00	1.551.943.282,80,00

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap dan investasi jangka panjang. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 3.774.452.669,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 44. Aset lainnya

No	Uraian	Jumlah
1	Tagihan Jangka Panjang	141.596.387,00
2	Aset Tak Berwujud	5.768.892.687,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(4.239.476.519,00)
4	Aset Lain-lain	19.231.950.358,05
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(18.734.284.951,05)
6	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	1.605.774.707,00
Jumlah		3.774.452.669,00

Penjelasan masing-masing akun aset lainnya sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang.

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
141.596.387,00	141.596.387,00

Jumlah Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp141.596.387,00.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp141.596.387,00 yang ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 201/KEP/BPP/2016 tentang Pembebanan Ganti Rugi Atas Kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi tahun 2015 dengan nilai sebesar Rp142.196.387,00 dan sampai saat ini baru berkurang sebesar Rp 600.000,00 atas nama Rasul Hamidi.

Adapun rincian Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2022 Rp141.596.387,00. terdiri atas:

Tabel 5. 45. Tagihan Jangka Panjang

No	Nama	Jumlah
1.	Ali Arifin	3.700.000,00
2.	Chandra Mustika	2.110.000,00
3.	Rasul Hamidi	5.125.000,00
4.	Baharuddin	16.136.105,00
5.	Wirda Satria	22.917.900,00
6.	Sudirman	44.261.040,00
7.	Busri Noneh	3.432.500,00
8.	Ramlan	5.915.292,00
9.	Suripno Azhari	5.300.000,00
10.	Surya Warsilah	24.000.000,00
11.	Normansyah	8.698.550,00
Jumlah		141.596.387,00

2. Aset Tak Berwujud.

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
5.768.892.687,00	4,476.398.727,00

Nilai Rp5.768.892.687,00 merupakan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

Saldo Awal	Rp 4.476.398.727,00
- Reklas dari Aset Tetap (+)	Rp 62.750.000,00
- Reklas dari Barang Jasa (+)	Rp 1.415.753.960,00
- Lebih catat (-)	Rp (186.010.000,00)
- Saldo akhir	<u>Rp 5.768.892.687,00</u>

Aset tak berwujud merupakan *software* dan Dokumen yang berada pada SKPD yang masih digunakan dengan penambahan Tahun 2022 sebesar Rp1.478.503.960,00 berupa:

- Reklasifikasi dari Belanja Jasa Penilai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah berupa Penambahan Vitur pada Aplikasi SIM PBB senilai Rp49.950.000,00.
- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Pengembangan Aplikasi Online PPDB senilai Rp35.000.000,00.
- Reklasifikasi dari Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Dokumen Penyusunan RDTR, RRTR, RTRW dan Rencana Pengolahan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kab/Kota senilai Rp1.365.803.960,00.
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan Mesin pada Dinas Perhubungan berupa Software Aplikasi BLUe dan RFID senilai Rp27.750.000,00.

Pengurangan aset tak berwujud merupakan koreksi lebih catat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa dokumen survei kondisi jalan dan jembatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp186.010.000,00 (Survei ini dilakukan setiap tahun sebagai salah satu syarat permohonan Dana Alokasi Khusus).

Rincian lebih lanjut tentang aset Lainnya dapat di lihat pada lampiran 19

Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	Rp	4.900.000,00
Kecamatan Nan Sabaris	Rp	15.536.000,00
Kecamatan Batang Anai	Rp	8.750.000,00
Kecamatan V Koto Timur	Rp	67.644.400,00
Kecamatan Padang Sago	Rp	26.940.000,00
Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Rp	41.825.000,00
Kecamatan Patamuan	Rp	24.525.337,00
Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	Rp	7.900.000,00
Kecamatan Batang Gasan	Rp	6.296.066,00
Kecamatan Enam Lingkung	Rp	38.100.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	36.474.995,00
Dinas Kesehatan	Rp	165.460.820,00
RSUD	Rp	979.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	37.168.750,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	84.806.500,00
Dinas Perhubungan	Rp	39.098.775,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	85.412.300,00
Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	48.426.250,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	112.572.636,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	130.958.000,00
Dinas PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana	Rp	50.176.000,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	4.850.000,00
Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	Rp	115.556.000,00
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perizinan	Rp	179.315.394,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	12.967.750,00
Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Rp	15.089.250,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	71.970.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp	131.457.005,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp	45.093.750,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp	58.600.875,00
Dinas Perikanan	Rp	70.318.333,00

- Penghapusan Peralatan Mesin Aset dalam Penelusuran sesuai SK Nomor 460/KEP/BPP/2022 sebesar Rp277.586.050,00 dan SK Nomor 546/KEP/BPP/2020 sebesar Rp179.860.000,00 pada:

Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	Rp	99.117.500,00
---	----	---------------

Kecamatan Lubuk Alung	Rp	3.200.000,00
Kecamatan V Koto Kampung Dalam	Rp	7.000.000,00
Kecamatan Nan Sabaris	Rp	4.500.000,00
Kecamatan Batang Anai	Rp	2.000.000,00
Kecamatan Patamuan	Rp	7.600.000,00
Kecamatan Batang Gasan	Rp	18.900.000,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	17.660.000,00
Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Rp	16.283.000,00
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Rp	17.900.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	179.860.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	82.425.550,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp	1.000.000,00

- Penghapusan Gedung dan Bangunan dalam keadaan Rusak Berat dan adanya pembangunan ruang baru dengan SK Nomor 529/KEP/BPP/2022 senilai Rp116.514.560,00 pada Dinas Pendidikan (SDN 17, 34 Sungai Sariak dan SMPN 2 Sungai Limau).
 - Penghapusan Aset Tetap Lainnya yang tercatat pada aset dalam penelusuran setelah dilakukan pengecekan ulang barang tersebut ditemukan dalam keadaan rusak berat sebesar Rp4.597.500,00 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai SK Nomor 500/KEP/BPP/2022, SK Nomor 546/KEP/BPP/2022 senilai Rp200.000,00 pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Koreksi Penghapusan Audited 2022).
- b. Reklasifikasi dari Aset Lain-lain sebesar Rp303.527.500,00 merupakan:
- Reklasifikasi Aset Rusak Berat Peralatan Mesin ke Aset Tetap sebesar Rp22.407.500,00 pada:
 - Kecamatan Sungai Geringging Rp 3.700.000,00
 - Kecamatan Ulakan Tapakis Rp 18.707.500,00
 - Reklasifikasi Aset dalam penelusuran Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap sebesar Rp3.400.000,00 pada Kecamatan Ulakan Tapakis.
 - Reklasifikasi Aset Rusak Berat Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap senilai Rp277.720.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN 2 Sungai Limau) merupakan Bangunan Tempat Pendidikan yang kondisinya baik.
 - Aset Lain-lain Rusak Berat sebesar Rp17.353.301.786,05 (*rincian dapat dilihat pada Lampiran 17*).

- Aset Lain-lain Dalam Penelusuran sebesar Rp1.516.124.165,00 (*rincian dapat dilihat pada Lampiran 18*).
- Kas dalam penelusuran pada kegiatan reklamasi sebesar Rp41.824.407,00.
- Reklasifikasi Dana Bergulir yang masih dalam penelusuran sebesar Rp170.700.000,00.
- Reklasifikasi Investasi Non Permanen ke Perusda Saiyo yang sudah dibubarkan sebesar Rp150.000.000,00.

4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud.

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
(4.239.476.519,00)	(3.772.374.927,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(4.239.476.519,00) terdiri dari:

Saldo Awal	Rp (3.772.374.927,00)
Amortisasi 2022 (+)	Rp (541.505.592,00)
Koreksi Lebih (-)	Rp 74.404.000,00
Saldo akhir	<u>Rp (4.239.476.519,00)</u>

Amortisasi Aset Tak Berwujud untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp(541.505.592,00)

Rincian lebih lanjut tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud dapat di lihat pada lampiran 15

5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain.

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
(18.734.284.951,05)	(20.692.347.199,49)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp(18.734.284.951,05) terdiri dari :

Saldo Awal	Rp (20.692.347.199,49)
a. Koreksi Kurang Hitung (+)	Rp (196.762.599,00)
b. Reklasifikasi dari Aset Tetap (+)	Rp (682.897.844,76)
c. Koreksi Lebih Hitung (-)	Rp 2.077.902,00
d. Penghapusan (-)	Rp 2.923.182.553,20
e. Reklasifikasi ke Aset Tetap (-)	Rp 303.527.500,00
f. Penyusutan tahun 2022 (+)	Rp (391.065.263,00)
Saldo akhir	<u>Rp (18.734.284.951,05)</u>

Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penambahan akumulasi penyusutan aset lain-lain berasal dari:

▪ Koreksi Kurang Hitung penyusutan aset lain-lain pada:

Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Rp	1.166.665,00
Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	Rp	37.450,00
Kecamatan Batang Anai	Rp	2.683.333,00
Dinas Kesehatan	Rp	7.103.385,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	735.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	1.208.333,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	179.956.250,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	3.543.283,00
Dinas Perikanan	Rp	328.900,00

▪ Reklasifikasi aset tetap peralatan mesin yang berubah kondisi menjadirusak berat sebesar Rp682.897.844,76 pada Rumah Sakit Umum Daerah.

b. Pengurangan akumulasi penyusutan aset lain-lain berasal dari:

▪ Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp2.923.182.553,20 pada:

Sekretariat Daerah	Rp	81.789.750,00
Sekretariat DPRD	Rp	30.454.250,00
Badan Pengelola Keuangan Daerah	Rp	176.472.299,00
Inspektorat Kabupaten	Rp	49.708.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	108.706.500,00
Kecamatan Lubuk Alung	Rp	121.322.893,00
Kecamatan Sungai Geringging	Rp	20.764.000,00
Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Rp	16.750.000,00
Kecamatan Ulakan Tapakis	Rp	22.750.000,00
Kecamatan Sungai Limau	Rp	10.100.000,00
Kecamatan V Koto Kampung Dalam	Rp	80.150.000,00
Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	Rp	9.250.000,00
Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	Rp	4.900.000,00
Kecamatan Nan Sabaris	Rp	20.036.000,00
Kecamatan Batang Anai	Rp	10.750.000,00
Kecamatan V Koto Timur	Rp	66.484.817,00
Kecamatan Padang Sago	Rp	26.940.000,00
Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Rp	41.394.167,00

Kecamatan Patamuan	Rp	32.125.337,00
Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	Rp	7.900.000,00
Kecamatan Batang Gasan	Rp	24.684.222,20
Kecamatan Enam Lingsung	Rp	38.100.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	152.989.555,00
Dinas Kesehatan	Rp	162.290.820,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	979.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	37.168.750,00
Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah	Rp	84.806.500,00
Dinas Perhubungan	Rp	39.098.775,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	85.069.467,00
Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	48.426.250,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	112.572.636,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	130.810.783,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	50.036.000,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	22.510.000,00
Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Rp	131.839.000,00
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Rp	197.215.394,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	192.827.750,00
Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Rp	15.089.250,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	154.395.550,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp	130.397.429,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp	44.603.750,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp	58.205.326,00
Dinas Perikanan	Rp	70.318.333,00

c. Reklasifikasi ke aset tetap gedung bangunan sebesar Rp277.720.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN 2 Sungai Limau) merupakan Bangunan Tempat Pendidikan yang kondisinya baik.

d. Penyusutan Aset Lain-lain tahun ini sebesar Rp391.065.263,00.

Rincian lebih lanjut tentang Akumulasi Aset Lainnya dapat di lihat pada lampiran 19

6. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility*.

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
1.605.774.707,00	0,00

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.605.774.707,00 dan Rp0,00.

nilai Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* sesuai dengan Surat dari kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-46/PK/PK.2/2023 perihal rincian Penyaluran DBH secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022.

E. KEWAJIBAN.

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
16.098.971.888,22	14.377.125.271,67

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp16.098.971.888,22 dan sebesar Rp14.377.125.271,67.

Saldo kewajiban tahun 2022 sebesar Rp16.098.971.888,22 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 46. Kewajiban

No	Uraian	Jumlah
1.	Kewajiban Jangka Pendek	16.057.147.481,22
2.	Kewajiban Jangka Panjang	41.824.407,00
Jumlah		16.098.971.888,22

1. Kewajiban Jangka Pendek.

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
16.057.147.481,22	14.335.300.864,67

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.057.147.481,22 yang terdiri dari:

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga.

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
20.000,00	20.000,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp20.000,00 dan sebesar Rp20.000,00. Utang Perhitungan Pihak Ketiga tahun 2022 merupakan utang Taperum sebesar Rp20.000,00 tahun 2021.

b. Pendapatan Diterima Dimuka.

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
1.475.775.000,00	1.539.966.666,67

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.475.775.000,00 Pendapatan Diterima Dimuka terdiri dari:

- 1) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa tanah untuk Bangunan Ruang Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Nagari di RSUD Parit Malintang sebesar Rp31.875.000,00.
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa lahan untuk pemasangan dan penempatan Menara Telekomunikasi Bersama (Multi Operator) dan Fasilitas Penunjangnya antara PT Daya Mitra Telekomunikasi dengan Pemda Padang Pariaman Rp21.000.000,00.
- 3) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa Fasilitas Gedung Kantor Sekretariat Daerah untuk Kantor Kas Bank Nagari dan Ruangan ATM sebesar Rp10.400.000.
- 4) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk Lahan Parkir beserta seluruh Fasilitas Pendukung Lainnya PT. Andalas Anai Permai Internasional sebesar Rp1.412.500.000.

c. Utang Belanja.

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
14.581.352.481,22	12.975.314.198,00

Saldo utang belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.581.352.481,22 yang terdiri dari:

Tabel 5. 47. Utang Belanja

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	148.936.360,00
2	Utang BelanjaBarang dan Jasa	5.090.972.611,00
3	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.272.621.270,00
4	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Jembatan	6.865.214.970,00
5	Utang Beban Transfer	1.203.607.270,22
Jumlah		14.581.352.481,22

Rincian lebih dapat dilihat sebagai berikut:

1) Utang Belanja Pegawai.

Tabel 5. 48. Utang Belanja Pegawai

No	SKPD	JUMLAH UN AUDITED
1	<p><u>Dinas Kesehatan.</u> Utang belanja pegawai atas Beban Pegawai BLUD Puskesmas-puskesmas per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.399.598,00</p>	13.399.598,00
2	<p><u>Rumah Sakit Umum Daerah.</u> Utang belanja pegawai atas Beban Gaji Pegawai yang terdiri dari Utang Belanja Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.558.703,00</p>	38.558.703,00
3	<p><u>Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</u> Utang belanja pegawai atas Beban Gaji Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 9.353.199,00.</p>	9.353.199,00
4	<p><u>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</u> Utang belanja pegawai atas Beban Gaji Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.125.385,00.</p>	6.125.385,00
5	<p><u>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</u> Utang belanja pegawai atas Beban Gaji Pegawai dan tunjangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.425.918,00</p>	5.425.918,00
6	<p><u>Dinas Komunikasi dan Informasi</u> Utang belanja pegawai atas Beban Gaji Pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.003.894,00.</p>	20.003.894,00
7	<p><u>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</u> Utang belanja pegawai atas Beban Gaji Pegawai Pertanian dan Ketahanan Pangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.300.493,00.</p>	20.300.493,00
8	<p><u>Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</u> Utang belanja pegawai atas Beban Gaji Pegawai Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan</p>	18.629.533,00

No	SKPD	JUMLAH UN AUDITED
9	Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.629.533,00. <u>Inspektorat Daerah</u>	705.903,00
10	Utang belanja pegawai atas Beban Gaji Pegawai Inspektorat Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp705.903. <u>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia</u>	16.433.734,00
	Utang belanja pegawai atas Beban Gaji Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.433.734,00.	
	Total	148.936.360,00

2) Utang Belanja Barang dan Jasa.

Tabel 5. 49. Utang Belanja Barang dan Jasa

No	SKPD	JUMLAH UN AUDITED
1	<u>Dinas Kesehatan</u> Utang Belanja Tagihan Listrik Bulan November dan Desember 2022 Rp29.490.245,00	29.490.245,00
2	<u>Rumah Sakit Umum Daerah</u>	5.021.702.606,00
a	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Jasa Pelayanan Kesehatan ASN sebesar Rp1.838.406.407,00	
b	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Jasa Pelayanan Kesehatan Non ASN sebesar Rp681.584.263,00	
c	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD atas Belanja Bahan Obat obatan sebesar Rp1.336.152.940,00	
d	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD atas Belanja Bahan Laboratorium dan BMHP sebesar Rp1.165.558.996,00	
3	<u>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	39.478.160,00
a	Utang Belanja Barang dan Jasa atas Pekerjaan Perencanaan Hibah Rehabilitasi Gedung Paket III oleh CV. GESTALT ARCHITECTURE sebesar Rp19.795.960,00 No. SPK : 039/SPK/CK-DPUPR/III-2020	

No	SKPD	JUMLAH UN AUDITED
b	Utang Belanja Barang dan Jasa atas atas Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pemb. Rehabilitasi Mesjid Syeh Burhanuddin oleh CV. TOTAL CITRA CONSULTANT sebesar Rp19.682.200,00 No. SPK : 059/SPK/CK-DPUPR/III-2020	
4	<u>Dinas Lingkungan Hidup , Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan</u> Utang Belanja Tagihan Air Bulan Desember 2022 sebesar Rp301.600,00	301.600,00
Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa		5.090.972.611,00

3) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Tabel 5. 50. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	SKPD	JUMLAH UN AUDITED
	<u>Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian</u>	
1	Utang Gedung dan Bangunan atas Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Sentra IKM Cokelat Padang Pariaman No.SPK : 078/SPSENTRAIKM/DPMPPTP/VII 2022 sebesar Rp1.267.646.250,00	1.267.646.250,00
2	Utang Gedung dan Bangunan atas Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Sentra IKM Cokelat Padang Pariaman No.SPK : 088/SPK/IND KONS/DPMPPTP/VII 2022 sebesar Rp4.975.020,00	4.975.020,00
Jumlah Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		1.272.621.270,00

4) Utang Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi.

Tabel 5. 51. Utang Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi

No	SKPD	JUMLAH UN AUDITED
1	<u>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	
1	Utang kepada PT.Kholil & Brothers atas Pembangunan Jalan Paket I DAU Hotmix, dengan Nomor Kontrak 099/SP/BM-DPUPR/IX-2022 sebesar Rp3.564.439.916,00	3.564.439.916,00
2	Utang kepada PT.Bunga Mas Perkasa atas Pembangunan Jalan Paket 2 DAU Hotmix, dengan	1.020.585.286,00

No	SKPD	JUMLAH UN AUDITED
	Nomor Kontrak 096/SP/BM-DPUPR/IX-2022 sebesar Rp1.020.585.286,00	
3	Utang kepada PT.Bunga Mas Perkasa atas Pembangunan Jalan Paket 3 DAU Hotmix, dengan Nomor Kontrak 097/SP/BM-DPUPR/IX-2022 sebesar Rp2.280.189.768,00	2.280.189.768,00
Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa		6.865.214.970,00

5) Utang Belanja Transfer.

Utang belanja transfer per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.203.607.270,22 yang merupakan utang transfer dana bagi hasil terdiri dari:

- a) Utang Belanja Transfer Pajak dan retribusi Ke Pemerintah Desa/Nagari.

Tabel 5. 52. Utang Belanja Transfer Pajak dan Retribusi

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Transfer DBH Pajak Hotel ke Nagari	6.161.360,50
2.	Transfer DBH Pajak Restoran ke Nagari	79.523.128,72
3.	Transfer DBH Pajak Hiburan ke Nagari	2.636.730,00
4.	Transfer DBH Pajak Reklame ke Nagari	11.448.130,00
5.	Transfer DBH Pajak Penerangan Jalan ke Nagari	338.519.921,00
6.	Transfer DBH Pajak Galian Gol C ke Nagari	29.181.555,00
7.	Transfer DBH Pajak Parkir ke Nagari	25.232.746,40
8.	Transfer DBH Pajak Air Bawah Tanah ke Nagari	98.536.155,30
9.	Transfer DBH BPHTB ke Nagari	59.685.337,20
10.	Transfer DBH PBB Pedesaan & Perkotaan ke Nagari	290.676.006,20
11.	Transfer DBH Retribusi Jasa Umum ke Nagari	43.870.500,00
12.	Transfer DBH Retribusi Jasa Usaha ke Nagari	4.426.120,00
13.	Transfer DBH Retribusi IMB ke Nagari	11.233.491,90
14.	Transfer DBH Retribusi Izin Trayek ke Nagari	24.500,00
Jumlah		1.001.155.682,22

- b) Utang Dana Transfer Pemerintah Pusat.

Tabel 5. 53. Utang Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Transfer DBH Pajak Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara Tahun 2019	202.451.588,00
Jumlah		202.451.588,00

Total utang belanja Transfer per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

1. Utang Belanja Transfer Pajak dan retribusi Ke Pemerintah Desa/Nagari.	1.001.155.682,22
2. Utang Dana Transfer Pemerintah Pusat.	202.451.588,00
Jumlah	1.203.607.270,22

Utang Dana Transfer Pemerintah Pusat tersebut merupakan utang lebih setor Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara Tahun 2019.

2. Utang Jangka Panjang.

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
41.824.407,00	41.824.407,00

Utang Jangka Panjang Tahun 2022 sebesar Rp41.824.407,00 yang terdiri dari:

a. Utang Jangka Panjang Lainnya.

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
41.824.407,00	41.824.407,00

Jumlah Utang Jangka Panjang Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp41.824.407,00 yang merupakan Utang atas Jaminan Reklamasi dan utang jangka Panjang lainnya Tahun 2021 sebesar Rp41.824.407,00.

F. EKUITAS.

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.324.258.353.152,43	1.321.902.441.491,99

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah daerah.

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir, dimana ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 berasal dari Saldo Ekuitas Awal ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit-LO dan perubahan ekuitas lainnya.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 di Neraca sebesar Rp1.324.258.353.152,43 adalah nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022.

Komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal.

Nilai Ekuitas Awal pada Neraca awal per 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp1.321.902.441.491,99

2. Surplus/Defisit-LO.

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(29.578.693.829,30) Perhitungan Surplus-LO adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LO	Rp	1.292.118.006.287,47
Beban	Rp	1.319.157.178.484,97
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	(27.039.172.197,50)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(1.923.302.195,80)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	(28.962.474.393,30)
Beban Luar Biasa	Rp	616.219.436,00
Surplus-LO	Rp	(29.578.693.829,30)

3. Koreksi Ekuitas.

Pada Tahun 2022 terdapat koreksi ekuitas sebesar Rp31.934.605.489,74

4. Ekuitas Akhir.

Saldo ekuitas akhir per Desember 2022 sebesar Rp1.324.258.353.152,43 sama dengan nilai ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022.

5.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit-LO dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya untuk Tahun Anggaran 2022.

Adapun rincian dari Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

A. PENDAPATAN.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.292.118.006.287,47	1.266.059.892.814,93

Pendapatan-LO Tahun 2022 sebesar Rp1.292.118.006.287,47 dan Tahun 2021 sebesar Rp1.266.059.892.814,93 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 54. Realisasi Pendapatan-LO

No.	Uraian	Saldo Tahun 2022	Saldo Tahun 2021	Kenaikan / Penurunan
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	130.668.628.174,15	118.747.683.816,95	11.920.944.357,20
2	Pendapatan Transfer-LO	1.095.990.263.603,00	1.078.250.429.349,00	17.739.834.254,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	65.459.114.510,32	69.061.779.648,98	(3.602.665.138,66)
Jumlah		1.292.118.006.287,47	1.266.059.892.814,93	26.058.113.472,54

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
130.668.628.174,15	118.747.683.816,95

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 sebesar Rp130.668.628.174,15 dan Tahun 2021 sebesar Rp118.747.683.816,95.

Masing-masing dari pendapatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 55. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

No	Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	54.724.927.635,24	47.447.694.891,56	7.277.232.743,68
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	2.089.619.567,00	2.592.458.942,00	(502.839.375,00)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.214.956.413,00	5.884.534.467,00	1.330.421.946,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	66.639.124.558,91	62.822.995.516,39	3.816.129.042,52
JUMLAH		130.668.628.174,15	118.747.683.816,95	11.920.944.357,20

a. **Pendapatan Pajak Daerah.**

Tahun 2022
(Rp)
54.724.927.635,24

Tahun 2021
(Rp)
47.447.694.891,56

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 sebesar Rp54.724.927.635,24 dan Tahun 2021 sebesar Rp47.447.694.891,56 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 56. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO

No	Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pajak Hotel-LO	200.571.992,00	142.644.605,00	57.927.387,00
2	Pajak Restoran-LO	2.486.754.287,24	1.779.113.278,00	707.641.009,24
3	Pajak Hiburan-LO	200.955.600,00	179.795.500,00	21.160.100,00
4	Pajak Reklame-LO	1.006.251.565,00	1.094.737.677,00	(88.486.112,00)
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	19.915.265.373,00	17.386.213.695,00	2.529.051.678,00
6	Pajak Parkir-LO	1.630.590.000,00	954.436.564,00	676.153.436,00
7	Pajak Air Tanah-LO	1.249.987.171,00	366.729.099,00	883.258.072,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	3.531.787.190,00	3.643.616.500,56	(111.829.310,56)
9	PBB Pedesaan dan Perkotaan-LO	13.724.060.998,00	12.939.872.676,00	784.188.322,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	10.778.703.459,00	8.960.535.297,00	1.818.168.162,00
JUMLAH		54.724.927.635,24	47.447.694.891,56	7.277.232.743,68

Apabila dibandingkan Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-Lo maka terdapat selisih sebagai berikut :

Piutang Pajak Daerah tahun lalu	Rp	40.886.755.856,00
Pendapatan Pajak Daerah – LO	Rp	54.724.927.635,24
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	Rp	(50.121.822.881,24)
Piutang Pajak Daerah Tahun ini	Rp	(47.004.150.766,00)
Selisih	Rp	(1.514.290.156,00)

Selisih sebesar Rp(1.514.290.156,00) sebagaimana tabel diatas merupakan penyesuaian atas piutang PBB yang terdiri atas:

1. Pendapatan denda atas piutang PBB tahun sebelumnya (Tahun 2014 s/d Tahun 2021) yang tercatat sebagai penerimaan PBB sebesar Rp213.893.716,00.
2. Adanya piutang PBB yang kurang catat dimana hasil penelusuran pada Aplikasi SIM PBB ditemukan adanya kurang catat sebesar Rp1.300.396.440,00.

Saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp54.724.927.635,24 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun 2022	Rp	50.121.822.881,24
(-)Piutang Pajak Tahun 2021	Rp	(40.886.755.856,00)
Denda Piutang PBB Tahun 2014 s/d 2021	Rp	(308.924.264,00)
penyesuaian atas utang PBB	Rp	(1.332.232.565,00)
(+) Piutang Pajak Tahun 2022	Rp	47.131.017.439,00
Jumlah	Rp	54.724.927.635,24

b. Pendapatan Retribusi Daerah.

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
2.089.619.567,00	2.592.458.942,00

Jumlah Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah selama Tahun 2022 sebesar Rp2.089.619.567,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp2.592.458.942,00.

Uraian dari Pendapatan Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 57. Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan – LO	531.550.000,00	513.250.000,00	18.300.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	26.283.000,00	21.032.000,00	5.251.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	382.085.000,00	474.988.300,00	(92.903.300,00)
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	28.434.500,00	21.605.000,00	6.829.500,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	36.279.700,00	0,00	36.279.700,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	474.250.000,00	795.547.294,00	(321.297.294,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	106.784.920,00	137.042.340,00	(30.257.420,00)
Retribusi Terminal – LO	33.665.000,00	27.632.000,00	6.033.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	40.025.000,00	47.480.000,00	(7.455.000,00)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah – LO	40.000.000,00	30.092.500,00	9.907.500,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	390.017.447,00	523.354.508,00	(133.337.061,00)
Retribusi Izin Trayek – LO	245.000,00	435.000,00	(190.000,00)
JUMLAH	2.089.619.567,00	2.592.458.942,00	(502.839.375,00)

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Tahun 2022 (Rp) 7.214.956.413,00	Tahun 2021 (Rp) 5.884.534.467,00
---	---

Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2022 sebesar Rp7.214.956.413,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp5.884.534.467,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan bagian laba Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Nagari.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Tahun 2022 (Rp) 66.639.124.558,91	Tahun 2021 (Rp) 62.822.995.516,39
--	--

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah selama Tahun 2022 sebesar Rp66.639.124.558,91 dan tahun 2021 sebesar Rp62.822.995.516,39. Uraian atas Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 58. Penerimaan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO	0,00	555.649.770,00	(555.649.770,00)
Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)
Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO	12.840.000,00	149.100.000,00	(136.260.000,00)
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan- LO	0,00	52.045.100,00	(52.045.100,00)
Hasil Sewa BMD-LO	101.691.666,67	37.300.000,00	64.391.666,67
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	3.533.534.755,00	3.551.031.322,00	(17.496.567,00)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	10.203,00	4.955.401,00	(4.945.198,00)
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	0,00	575.785,00	(575.785,00)
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	18.315.138,00	(18.315.138,00)
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	184.098,00	33.799.369,00	(33.615.271,00)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	0,00	2.398.500,00	(2.398.500,00)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	62.157.500,00	22.655.000,00	39.502.500,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	302.740.058,82	1.029.593.187,00	(726.853.128,18)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.316.383.674,80	1.036.409.422,64	279.974.252,16

Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	0,00	2.837.260,00	(2.837.260,00)
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	0,00	9.754.330,00	(9.754.330,00)
Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	0,00	13.719.465,00	(13.719.465,00)
Pendapatan Denda PBBP2	6.366.611,00	0,00	6.366.611,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	0,00	2.720.697,00	(2.720.697,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	1.245.916.862,42	1.830.106.618,75	(584.189.756,33)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	677.566.400,00	468.806.000,00	208.760.400,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota-LO	56.425.000,00	3.445.000,00	52.980.000,00
Pendapatan dari BLUD-LO	58.598.826.486,00	53.972.373.151,00	4.626.453.335,00
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya-LO	0,00	405.000,00	(405.000,00)
Hasil Penjualan Aset lainnya-LO	724.091.794,00	0,00	724.091.794,00
Pendapatan Remunirasi TDF -LO	389.44,20	0,00	389.449,00
Jumlah	66.639.124.558,91	62.822.995.516,39	3.816.129.042,32

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.816.129.042,32.

Apabila dibandingkan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA dengan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO maka terdapat selisih sebagai berikut :

Piutang Lain2 Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2021	Rp	50.091.518,00
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO	Rp	66.639.124.558,91
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA	Rp	(66.434.186.305,04)
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun ini	Rp	(112.952.405,20)
Selisih	Rp	142.077.366,67

Selisih sebesar Rp142,077,366.67 terjadi karena adanya hal-hal sebagai berikut :

1	Koreksi Ekuitas-Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.	Rp	1.504.450,00
2	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diterima dimuka.	Rp	64.191.666,67
3	Denda atas keterlambatan pekerjaan.	Rp	144.050.347,00
4	Piutang TGR.	Rp	4.600.000,00
5	Koreksi Pendapatan Lain-lain (Denda Piutang Pajak PBB).	Rp	(95.030.548,00)
6	Koreksi Ekuitas-Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah atas Piutang dana BOS Tahun 2018.	Rp	22.761.451,00
	Jumlah	Rp	142.077.366,67

2. PENDAPATAN TRANSFER.

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
1.095.990.263.603,00	1.078.250.429.349,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp1.095.990.263.603,00 dan Rp1.078.250.429.349,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 59. Rincian Pendapatan Transfer-LO

Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.022.988.587.333,00	1.011.659.083.296,00	11.329.504.037,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	73.001.676.270,00	66.591.346.053,00	6.410.330.217,00
JUMLAH	1.095.990.263.603,00	1.078.250.429.349,00	17.739.834.254,00

Jika dibandingkan pendapatan transfer-LRA dengan Pendapatann transfer-LO maka terdapat perbedaan sebesar Rp106.964.684.214,00 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang transfer tahun 2021	Rp	0,00
Pendapatan transfer-LO	Rp	1.095.990.263.603,00
Pendapatan transfer-LRA	Rp	(1.191.493.250.334,00)
Piutang transfer Tahun 2022	Rp	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2022	Rp	(11.461.697.483,00)
Selisih	Rp	(106.964.684.214,00)

Selisih pendapatan transfer-LO sebesar Rp106.964.684.214,00 merupakan pendapatan yang berasal dari dana desa sebesar Rp94.772.298.000,00 tidak dicatat sebagai pendapatan-LO, namun dicatat sebagai Pendapatan-LRA. Selanjutnya terdapat penerimaan piutang sebesar Rp13.924.160.921,00 yang merupakan penerimaan piutang transfer antar daerah tahun 2021.

Kemudian adanya beberapa penerimaan Pendapatan yang tidak tercatat sebagai pendapatan-LRA tetapi dicatat sebagai pendapatan-LO adalah aset lain-lain yang berasal dari Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp1.605.774.707,00 dan adanya pemotongan DAU dari yang dipotong berdasarkan KMK Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi hasil Tahun 2022 Tahap Pertama dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari APBD atas dukungan terhadap Penanganan dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebesar Rp126.000.000,00 yang tetap harus dicatat walaupun anggaran sudah di potong.

Saldo Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.095.990.263.603,00 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan Transfer-LRA 2022	Rp	1.191.493.250.334,00
(-)Penerimaan Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2022	Rp	(13.924.160.921,00)
(-) Dana Desa	Rp	(94.772.298.000,00)
(+)Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2022	Rp	11.461.697.483,00
(+)Dana Treasuri Deposit Facility (TDF)	Rp	1.605.774.707,00
(+) Dana Pemulihan Covid 19 sesuai KMK no. 34 tahun 2022	Rp	126.000.000,00
Pendapatan Transfer-LO	Rp	1.095.990.263.603,0

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO.

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
1.022.988.587.333,00	1.011.659.083.296,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat selama tahun 2022 sebesar Rp1.022.988.587.333,00 dan tahun 2021 sebesar Rp1.011.659.083.296,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 60. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO

Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dana Perimbangan	1.021.670.920.333,00	1.011.659.083.296,00	10,011,837,037.00
Dana Insentif Daerah (DID)	1.317.667.000,00	0,00	1.317.667.000,00
Dana Desa	0,00	0,00	0,00
	1.022.988.587.333,00	1.011.659.083.296,00	11.329.504.037,00

Apabila dibandingkan Pendapatan Pemerintah Pusat-LRA dengan Pendapatann Pemerintah Pusat-LO maka terdapat perbedaan sebesar Rp93.040.523.293,00 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang transfer Pemerintah Pusat 2021	Rp	0,00
Pendapatan transfer Pemerintah Pusat-LO	Rp	1.022.988.587.333,00
Pendapatan transfer Pemerintah Pusat-LRA	Rp	(1.116.029.110.626,00)
Piutang transfer Pemerintah Pusat 2022	Rp	0,00
Selisih	RP	(93,040,523,293.00)

Selisih pendapatan transfer-LO sebesar Rp(93.040.523.293,00) terdiri atas Rp94.772.298.000,00 merupakan pendapatan yang berasal dari dana desa yang tidak dicatat pada pendapatan-LO,

Kemudian terdapat pendapatan yang tidak dicatat sebagai pendapatan-LRA tetapi dicatat sebagai pendapatan-LO yaitu Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp1.605.774.707 dan adanya pemotongan DAU berdasarkan KMK Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun 2022 tahap pertama dalam rangka penggantian dana yang bersumber dari APBD atas dukungan terhadap Penanganan dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebesar Rp126.000.000,00 namun tetap harus dicatat sebagai pendapatan-LO.

Pendapatan Pemerintah Pusat-LRA 2022	Rp	1,116,029,110,626.00
(-) Penerimaan Piutang Transfer Pusat 2022	Rp	0,00
(-) Dana Desa	Rp	(94.772.298.000,00)
(+) Dana Treasuri Deposit Facility (TDF)	Rp	1.605.774.707,00
(+) Dana Pemulihan Covid 19 sesuai KMK no. 34 tahun 2022	Rp	126.000.000,00
Pendapatan Transfer-LO	Rp	1.022.988.587.333,00

1) Dana Perimbangan-LO.

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
1.019.939.145.626,00	1.011.659.083.296,00

Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan yang diterima selama tahun 2022 adalah sebesar Rp1.019.939.145.626,00 dan tahun 2021 sebesar Rp1.011.659.083.296,00.

Tabel 5. 61. Rincian Dana Perimbangan-LO

Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	18.057.503.080,00	13.183.959.865,00	4.873.543.215,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	704.448.324.710,00	706.486.730.000,00	(2.038.405.290,00)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	93.252.089.236,00	109.751.325.748,00	(16.499.236.512,00)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	204.181.228.600,00	182.237.067.683,00	21,944,160,917.00
JUMLAH	1.019.939.145.626,00	1.011.659.083.296,00	8.280.062.330,00

Piutang Dana Perimbangan tahun 2021	Rp	0,00
Pendapatan Dana Perimbangan -LO	Rp	1.021.670.920.333,00
Pendapatan Perimbangan-LRA	Rp	1.019.939.145.626,00
Piutang Dana Perimbangan Tahun 2022	Rp	0.00
Selisih	RP	1.731.774.707,00

Selisih pendapatan Dana Perimbangan-LO sebesar Rp 1.731.774.707,00 terdiri atas Rp1.605.774.707,00 merupakan Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan Rp126.000.000,00 merupakan dana yang berasal atas KMK Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi hasil Tahun 2022 Tahap Pertama dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari APBD atas dukungan terhadap Penanganan dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*).

Saldo Pendapatan Dana Perimbangan-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.021.670.920.333,00 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan Dana Perimbangan-LRA 2022	Rp	1.019.939.145.626,00
(+)Dana Treasuri Deposit Facility (TDF)	Rp	1.605.774.707,00
(+) Dana Pemulihan Covid 19 sesuai KMK No. 34 Tahun 2022	Rp	126.000.000,00
Pendapatan Perimbangan-LO	Rp	1.021.670.920.333,00

a) Dana Bagi Hasil.

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
19.663.277.787,00	13.183.959.865,00

Jumlah Pendapatan Transfer-Dana Bagi Hasil yang diterima selama tahun 2022 adalah sebesar Rp19.663.277.787,00 dan tahun 2021 sebesar Rp13.183.959.865,00.

Tabel 5. 62. Dana Bagi Hasil

Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
DBH PBB-LO	6.683.360.586,00	5.686.251.485,00	997,109,101.00
DBH PPh Pasal 21-LO	8.053.788.755,00	4.481.064.861,00	3,572,723,894.00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	22.194.610,00	181.011.249,00	(158,816,639.00)
DBH CHT-LO	46.468.128,00	50.089.448,00	(3,621,320.00)
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	918.735.378,00	525.211.268,00	393,524,110.00
DBH SDA Minyak Bumi-LO	0,00	516.000,00	(516,000.00)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	21.193,00	603.700.281,00	(603,679,088.00)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	1.624.907.099,00	0,00	1,624,907,099.00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	143.737.827,00	299.451.946,00	(155,714,119.00)
DBH SDA Perikanan-LO	2.170.064.211,00	1.356.663.327,00	813,400,884.00
Jumlah	19.663.277.787,00	13.183.959.865,00	6.479.317.922,00

Apabila dibandingkan jumlah Pendapatan Dana Bagi Hasil-LRA dengan Pendapatan Dana Bagi Hasil-LO maka terdapat selisih sebagai berikut :

Piutang Dana Bagi Hasil tahun 2021	Rp	0,00
Pendapatan dana Bagi Hasil – LO	Rp	19.663.277.787,00
Pendapatan Bagi Hasil – LRA	Rp	18.057.503.080,00
Piutang Dana Bagi Hasil Tahun 2022	Rp	0.00
Selisih	Rp	1.605.774.707,00

Selisih sebesar Rp1.605.774.707,00 merupakan Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Saldo Pendapatan Dana Bagi Hasil-LO per 31 Desember 2022 sebesar sebesar Rp19.663.277.683,00 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan Dana Bagi Hasil-LRA 2022	Rp	18,057,503,080.00
(+)Dana Treasuri Deposit Facility (TDF)	Rp	1.605.774.707,00
Pendapatan Transfer-LO	Rp	19.663.277.787,00

b) Dana Alokasi Umum.

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
704.574.324.710,00	706.486.730.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer-Dana Alokasi Umum pada tahun 2022 sebesar Rp704.574.324.710,00 dan tahun 2021 sebesar Rp706.486.730.000,00.

Apabila dibandingkan Penerimaan Dana Alokasi Umum-LRA dengan Penerimaan Dana Alokasi Umum-LO maka terdapat selisih sebagai beriku :

Piutang Dana Alokasi Umu tahun 2021	Rp	0,00
Pendapatan Dana Alokasi Umum- LO	Rp	704.574.324.710,00
Pendapatan Alokasi Umum – LRA	Rp	704.448.324.710,00
Piutang Dana Alokasi Umum Tahun 2022	Rp	0.00
Selisih	Rp	126.000.000.00

Selisih tersebut merupakan DAU yang dipotong berdasarkan KMK Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi hasil Tahun 2022 Tahap Pertama dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari APBD atas dukungan terhadap Penanganan dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebesar Rp 126.000.000,00.

c) Dana Alokasi Khusus Fisik.

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
93.252.089.236,00	109.751.325.748,00

Jumlah Pendapatan Transfer-Dana Alokasi Khusus Fisik selama tahun 2022 sebesar Rp93.252.089.236,00 dan tahun 2021 sebesar Rp109.751.325.748,00.

d) Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
204.181.228.600,00	182.237.067.683,00

Jumlah Pendapatan Transfer-Dana Alokasi Khusus Non Fisik selama tahun 2022 sebesar Rp204.181.228.600,00 dan tahun 2021 sebesar Rp182.237.067.683,00.

2) Dana Insentif Daerah.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.317.667.000,00	0,00

Dana Insentif Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp1.317.667.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp0,00.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
73.001.676.270,00	66.591.346.053,00

Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi selama tahun 2022 sebesar Rp73.001.676.270,00 dan tahun 2021 sebesar Rp66.591.346.053,00.

Tabel 5. 63. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil	73.001.676.270,00	65.091.346.053,00	7.910.330.217,00
Bantuan Keuangan	0,00	1.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)
JUMLAH	73.001.676.270,00	66.591.346.053,00	6.410.330.217,00

Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO sebesar Rp73.001.676.270,00 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan Dana Bagi Hasil-LRA 2022	Rp	75.464.139.708,00
(-) Penerimaan Piutang Transfer Pusat Tahun 2021	Rp	(13.924.160.921,00)
(+)Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2022	Rp	11.461.697.483,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	Rp	73.001.676.270,00

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
65.459.114.510,32	69.061.779.648,98

Lain-lain Pendapatan Yang Sah selama tahun 2022 sebesar Rp65.459.114.510,32 dan tahun 2021 sebesar Rp69.061.779.648,98 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 64. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	62.036.346.175,00	1.382.804.000,00	60.653.542.175,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	1.650.333.335,32	308.746.480,98	1.341.586.854,34
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	473.435.000,00	0,00	473.435.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	1.299.000.000,00	7.994.782.000,00	(6.695.782.000,00)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0,00	1.975.000,00	(1.975.000,00)
Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	0,00	59.373.472.168,00	(59.373.472.168,00)
JUMLAH	65.459.114.510,32	69.061.779.648,98	(3.602.665.138,66)

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO pada Tahun 2022 dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.602.665.138,66 atau 5,22%.

Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2021	Rp0,00
Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	Rp65.459.114.510,32
Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA	Rp30.891.026.000,00
Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022	Rp0,00
Selisih	Rp34.568.088.510,32

Selisih Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO sebanyak Rp34.568.088.510,32 merupakan Pendapatan Hibah berupa Barang dan Jasa yang di reklas menjadi Aset Tetap yang terdiri dari :

1. Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp32.444.320.175,00 dengan rincian:
 - a. Hibah dari Perpustakaan RI sebesar Rp214.202.879,00.
 - b. Hibah dari Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp9.230.957.506,00.
 - c. Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp272.677.500,00.
 - d. Hibah dari Kementerian PUPR sebesar Rp27.726.682.290,00.
2. Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp1.650.333.335,32, dengan rincian :
 - a. Hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp77.433.335,32.

- b. Hibah dari Pemerintah Provinsi DKI pada POL PP Damkar sebesar Rp1.572.900.000,00.
- 3. Hibah dari kelompok masyarakat perorangan dalam negeri sebesar Rp473.495.000,00 dengan rincian:
 - a. Hibah dari CSR Gramedia sebesar Rp15.567.000,00.
 - b. Hibah dari komite sekolah sebesar Rp457.928.000,00.

a. Pendapatan Hibah.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
65.459.114.510,32	9.688.307.480,98

Jumlah Pendapatan Hibah tahun 2022 sebesar Rp65.459.114.510,32 dan tahun 2021 sebesar Rp9.688.307.480,98 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp62.036.346.175,00;
- 2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO sebesar Rp1.650.333.335,32;
- 3) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO sebesar Rp473.435.000,00; dan
- 4) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO sebesar Rp1.299.000.000,00.

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
0,00	59.373.472.168,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2022 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp59.373.472.168,00.

Pengujian terhadap pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi (LRA) dapat dilihat pada Lampiran 20.

B. BEBAN.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.319.157.178.484,97	1.294.181.703.175,86

Jumlah beban tahun 2022 sebesar Rp1.319.157.178.484,97 dan tahun 2021 sebesar Rp1.294.181.703.175,86 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 65. Rincian Beban

Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Pegawai	672.682.313.447,42	709.672.160.599,67	(36.989.847.152,25)
Beban Barang dan Jasa	319.064.139.840,69	292.556.936.674,67	26.507.203.166,02
Beban Hibah	12.062.260.500,00	11.408.193.435,00	654.067.065,00
Beban Bantuan Sosial	4.523.350.000,00	55.000.000,00	4.468.350.000,00
Beban Penyisihan Piutang	33.449.503.926,64	29.719.793.362,55	3.729.710.564,09
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	46.714.812.863,00	38.047.411.219,31	8.667.401.643,69
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	53.684.369.985,00	50.187.778.499,26	3.496.591.485,74
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	97.895.891.855,00	83.871.541.180,00	14.024.350.675,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	541.505.592,00	299.757.125,40	241.748.466,60
Beban Bagi Hasil	6.450.646.985,22	4.652.223.280,00	1.798.423.705,22
Beban Bantuan Keuangan	72.088.383.490,00	73.710.907.800,00	(1.622.524.310,00)
JUMLAH	1.319.157.178.484,97	1.294.181.703.175,86	24.975.475.309,11

Beban pada tahun 2022 dibandingkan dengan beban tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 24.975.475.309,11 atau 1,93%.

1. Beban Pegawai.

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
672.682.313.447,42	709.672.160.599,67

Jumlah Beban Pegawai tahun 2022 sebesar Rp672.682.313.447,42 dan tahun 2021 sebesar Rp709.672.160.599,67. Beban pegawai merupakan beban atas kompensasi, yang dibayarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Tabel 5. 66. Rincian Beban Pegawai

Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Gaji Pokok ASN	309.719.586.878,00	319.833.986.046,75	(10.114.399.168,75)
Beban Tunjangan Keluarga ASN	29.584.029.151,42	30.654.472.577,00	(1.070.443.425,58)
Beban Tunjangan Jabatan ASN	6.476.348.661,00	6.319.723.200,00	156.625.461,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	22.227.542.293,00	22.917.963.750,00	(690.421.457,00)
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.255.738.739,00	3.356.042.000,00	(100.303.261,00)
Beban Tunjangan Beras ASN	17.180.572.875,00	17.786.703.864,00	(606.130.989,00)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	412.851.813,00	434.541.255,00	(21.689.442,00)
Beban Pembulatan Gaji ASN	4.273.451,00	4.337.856,00	(64.405,00)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.757.109.308,00	13.120.004.765,00	(362.895.457,00)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	636.748.817,00	655.554.597,00	(18.805.780,00)

Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.909.255.934,00	1.966.178.021,00	(56.922.087,00)
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	92.322.603.175,00	2.268.449.459,00	90.054.153.716,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.594.238.580,00	0,00	1.594.238.580,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.978.182.566,00	1.534.537.806,00	443.644.760,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	0,00	85.757.621.604,92	(85.757.621.604,92)
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.795.625.000,00	1.657.947.331,00	137.677.669,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	93.594.375,00	57.968.869,00	35.625.506,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	125.535.939.215,00	141.634.048.435,00	(16.098.109.220,00)
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.756.750.000,00	1.420.000.000,00	336.750.000,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	8.005.500.074,00	(8.005.500.074,00)
Beban Honorarium	5.641.387.500,00	5.095.693.250,00	545.694.250,00
Beban Uang Representasi DPRD	892.290.000,00	892.290.000,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	58.027.200,00	74.104.800,00	(16.077.600,00)
Beban Tunjangan Beras DPRD	72.347.580,00	96.897.960,00	(24.550.380,00)
Beban Uang Paket DPRD	76.482.000,00	76.482.000,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.293.820.500,00	0,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	115.649.100,00	115.649.100,00	0,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	28.090.125,00	15.894.900,00	12.195.225,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.024.000.000,00	3.528.000.000,00	(504.000.000,00)
Beban Tunjangan Reses	756.000.000,00	924.000.000,00	(168.000.000,00)
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan	862.094,00	816.702,00	45.392,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.200.539.434,00	2.523.258.258,00	677.281.176,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.990.400.000,00	5.990.400.000,00	0,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	50.700.000,00	54.600.000,00	(3.900.000,00)
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.552.000,00	7.056.000,00	(504.000,00)
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	91.260.000,00	98.280.000,00	(7.020.000,00)
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	7.097.160,00	(1.013.880,00)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	417.589,00	469.056,00	(51.467,00)
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	240,00	360,00	(120,00)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.483.520,00	5.483.520,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00

Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	316.875.000,00	200.917.500,00	115.957.500,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	5.968.125,00	2.572.920,00	3.395.205,00
Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	133.374.000,00	(22.494.000,00)
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	504.000.000,00	410.000.000,00	94.000.000,00
Beban Pegawai BOS	0,00	15.548.060.250,00	(15.548.060.250,00)
Beban Pegawai BLUD	21.192.758.049,00	13.190.911.573,00	8.001.846.476,00
JUMLAH	672.682.313.447,42	709.672.160.599,67	(36.989.847.152,25)

Beban Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp672.682.313.447,42 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp709.672.160.599,67 mengalami penurunan sebesar Rp36.989.847.152,25 atau 5,21%.

2. Beban Barang dan Jasa.

Tahun 2022 **Tahun 2021**
(Rp) **(Rp)**
319.064.139.840,69 **292.556.936.674,67**

Jumlah Beban Barang dan Jasa selama tahun 2022 sebesar Rp319.064.139.840,69 dan tahun 2021 sebesar Rp292.556.936.674,67. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun yang tidak. Rincian jumlah Beban Barang dan Jasa selama Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 67. Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Barang Pakai Habis	83.406.975.042,05	77.778.649.708,93	5.628.325.333,12
Beban Barang Tak Habis Pakai	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
Beban Jasa Kantor	74.656.397.247,00	75.783.844.773,00	(1.127.447.526,00)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	11.772.916.817,00	11.500.058.975,00	272.857.842,00
Beban Sewa Tanah	2.500.000,00	42.583.215,00	(40.083.215,00)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.159.515.992,00	1.810.139.417,00	1.349.376.575,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.220.863.050,00	4.003.657.400,00	(782.794.350,00)
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	16.100.000,00	(16.100.000,00)
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	655.479.860,00	931.594.406,00	(276.114.546,00)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	397.375.800,00	313.014.500,00	84.361.300,00

Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.000.000,00	148.419.000,00	(136.419.000,00)
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	0,00	697.000.000,00	(697.000.000,00)
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	5.258.000,00	(5.258.000,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.501.031.957,00	3.327.113.261,00	(826.081.304,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.275.202.203,00	1.217.386.752,00	57.815.451,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.094.182.748,00	2.359.846.510,00	(265.663.762,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.118.729.296,00	49.338.264.850,00	7.780.464.446,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	148.941.370,00	0,00	148.941.370,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	258.047.700,00	(258.047.700,00)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	684.535.352,00	(684.535.352,00)
Beban Barang dan Jasa BOS	46.940.955.534,00	32.687.304.790,00	14.253.650.744,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	31.632.772.924,64	29.588.118.064,74	2.044.654.859,90
Jumlah	319.064.139.840,69	292.556.936.674,67	26.507.203.166,02

3. Beban Hibah.

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
12.062.260.500,00	11.408.193.435,00

Jumlah Beban Hibah tahun 2022 sebesar Rp12.062.260.500,00 dan tahun 2021 sebesar Rp11.408.193.435,00 yang merupakan Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Adapun Rincian dari Beban Hibah:

Tabel 5. 68. Rincian Beban Hibah

Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	126.000.000,00	0,00	126.000.000,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00	83.395.125,00	16.604.875,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.310.558.000,00	6.822.563.410,00	(1.512.005.410,00)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.205.513.600,00	3.589.164.900,00	(383.651.300,00)